

# LAPORAN KESELURUHAN PELAKSANAAN PROGRAM



## DESAIN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PELAKSANAAN RZWP-3-K DI PROVINSI PAPUA BARAT ICM-COREMAP-CTI



## LAPORAN KESELURUHAN PELAKSANAAN PROGRAM

**Tema Paket 4:  
Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (ICM)**

### JUDUL:

**Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di Provinsi Papua Barat**

### Disusun oleh:

**Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan  
Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB)**

### Didukung oleh:

**Program Hibah COREMAP-CTI World Bank  
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)**

### Alamat Lembaga:

**Kampus IPB Baranangsiang  
Jalan Pajajaran Raya No.1  
Bogor, Jawa Barat**

**(April, 2022)**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	iii
<b>Daftar Tabel</b> .....	iv
<b>Daftar Gambar</b> .....	iv
<b>1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Sasaran .....	1
1.3 Ruang Lingkup pekerjaan.....	1
1.4 Metodologi.....	2
1.5 Informasi Ringkas Organisasi dan proyek.....	2
<b>2 PELAKSANAAN PROGRAM</b> .....	3
2.1 Kerangka Kerja (Logical Framework) .....	3
2.2. Kemajuan dan Pencapaian Masing-masing Output.....	23
2.3. Hambatan dalam Pencapaian output dan Upaya Mengatasi .....	35
2.4 Penyerapan Anggaran.....	36
<b>3 DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN PROYEK</b> .....	38
<b>4 INOVASI DAN TEROBOSAN</b> .....	39
<b>5 PEMBELAJARAN</b> .....	39
<b>6 REKOMENDASI PENTING SEBAGAI TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL/OUTPUT SETELAH PROGAM BERAKHIR DAN TANTANGANNYA</b> .....	42

## **Kata Pengantar**

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenan-NYA laporan akhir tahun 2021 Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di Provinsi Papua Barat dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur Proyek kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di Provinsi Papua Barat tahun 2021 telah dilaksanakan.

Pelaksanaan program Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di Provinsi Papua Barat tahun 2020 diuraikan secara jelas pada laporan kegiatan ini, diantaranya : pelaksanaan program, dampak dan keberlanjutan proyek, inovasi dan terobosan, pembelajaran, serta rekomendasi penting sebagai tindak lanjut terhadap hasil/output setelah program berakhir dan tantangan.

Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di Provinsi Papua Barat dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Bogor, 20 April 2022

**Direktur Proyek**

Fery Kurniawan

## Ringkasan Eksekutif

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB) sejak 2016 telah ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi sebagai Pusat Unggulan IPTEK (PUI) nasional dalam bidang pengelolaan pesisir terpadu (integrated coastal management). Dengan predikat ini, sejak Agustus 2020 Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB) dipercaya untuk melaksanakan proyek Desain pengelolaan wilayah pesisir terpadu dalam mendukung percepatan pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat, sebagai salah satu bagian dari Program dan kegiatan Coral reef rehabilitation and management program – coral triangle initiative (COREMAP-CTI) hibah dari World Bank melalui Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (Indonesia Climate Change Trust Fund) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan kegiatan Mendukung percepatan pelaksanaan RZWP3K Provinsi Papua Barat dan KKP/KKPD di Provinsi Papua Barat, pada khususnya Kabupaten Raja Ampat.

Adapun Ruang lingkup kegiatan ini meliputi:

1. Peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut, melalui pengembangan dan implementasi system monitoring dan evaluasi implementasi RZWP3K serta penyusunan platform tata Kelola pesisir terpadu;
2. Penyusunan rencana teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pariwisata;
3. Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi;
4. Pemulihan ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui rehabilitasi;
5. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas proyek.
6. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, beragam input program akan diberikan pada berbagai level pemerintah (provinsi-kabupaten dan desa), dan beragam unsur masyarakat (nelayan-pembudidaya-pariwisata dll). Salah satu intervensi program yang akan diberikan baik pada level pemerintah dan masyarakat adalah Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi. Keberhasilan input program tersebut bermuara pada terwujudnya tata kelola dan peningkatan pengetahuan dalam mengimplementasikan pendekatan pengelolaan terpadu dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RZWP3K.

Bagaimana wujud pengelolaan pesisir terpadu ketika nantinya diimplementasikan, sangat ditentukan dari pengetahuan (knowledge) yang telah dimiliki, sikap (attitude) terhadap sumberdaya dan tata kelola yang terpadu, serta praktik (practices) yang telah dilakukan selama ini, dan terwujud dalam hasil pengelolaan yang diindikasikan dengan beberapa kriteria sebagai berikut: (1) terlindunginya ekosistem pesisir esensial seperti mangrove, rumput laut, salt marsh dan terumbu karang; (2) terkelolanya sumber daya pesisir secara efisien dan tidak merusak lingkungan; (3) tata kelola pengelolaan yang tidak eksklusif dan melibatkan para pihak yang seluas-luasnya; (4) dalam pemanfaatan sumber daya pesisir menghasilkan nilai ekonomi yang terdistribusi kepada semua pihak; (5) pemanfaatan pesisir memberikan kesempatan dan manfaat secara adil kepada setiap pelaku pembangunan, terutama kepada masyarakat.

## Daftar Tabel

Tabel 1	Kerangka kerja (Logical Framework) Paket 4 .....	3
Tabel 2	Kemajuan dan capaian masing-masing output di tahun 2020.....	23
Tabel 3	Penyerapan anggaran pada periode 2020 .....	37
Tabel 4	Dampak proyek terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemerintah <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 5	Strategi keberlanjutan proyek.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1	Media cetak yang dihasilkan sebagai produk publikasi dan komunikasi .....	44
Gambar 2	Produk media kit yang dihasilkan.....	44
Gambar 3	Berita-berita yang dimuat di media sosial dan website IPB official .....	45
Gambar 4	Desain funfact yang dimuat di media sosial dan website PKSPL.....	45
Gambar 5	Beberapa proses wawancara terhadap calon konsultan dan tenaga lapang.....	48
Gambar 6	Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama bulan September – Oktober 2020 .....	51
Gambar 7	Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama bulan November - Desember 2020 .....	54
Gambar 8	Poster pengadaan konsultan dan tenaga lapang yang diperlukan dalam pemenuhan output periode 2020 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 9	Informasi adanya peningkatan jumlah masyarakat yang terpapar kampanye tentang konservasi sumberdaya pesisir dan laut .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini, Indonesia sedang menggalakkan pembangunan pesisir dan laut diberbagai sektor. Untuk itu, perencanaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil komponen utama dalam menentukan arah pembangunan dan jaminan insvestasi. Tetapi, implementasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) diperkirakan akan terjadi tumpang tindih antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi/pemanfaatan sumberdaya yang tidak saling mendukung bahkan tidak saling menegaskan satu sama lain. Selain itu, konflik sosial di level akar rumput juga akan terjadi karena RZWP-3-K dalam proses perencanaannya kurang mampu melibatkan peran masyarakat di level terendah, belum tersosialisasi, dapat membatasi akses-akses masyarakat yang telah menjadi sumber penghidupan dan aktivitas sehari-hari dan belum memiliki pedoman teknis dalam implementasinya.

RZWP-3-K diharapkan mampu mewujudkan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir dan laut, serta menjamin kepastian hukum dalam investasi. Untuk itu, dibutuhkan adanya instrumen yang tepat dalam implementasinya, yaitu protokol RZWP-3-K dengan kerangka ICZM. Protokol standar dibutuhkan dengan kriteria yang lebih jelas tentang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama pada wilayah konservasi, agar kepentingan perlindungan ekologi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Protokol tersebut juga mengatur bagaimana upaya pemulihan sumberdaya penting wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan akibat alam, tekanan pemanfaatan sumberdaya dan pengrusakan sumberdaya, dan bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dibutuhkan dan harus diterapkan agar mampu menjamin kebijakan, rencana dan program (K/R/P) yang tertuang dalam RZWP-3-K dan RPZ kawasan konservasi dapat dilaksanakan sesuai strategi yang ada, meskipun didala dokumen perencanaannya sudah terdapat arahan monitoring dan evaluasi yang direkomendasikan.

Hal ini dapat terwujud melalui konsensus kerjasama semua pihak yang diikat melalui pendekatan keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir, yang didalamnya mencakup: (1) Adanya platform tata kelola ICZM kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui konsensus kolaboratif; (2) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia stakeholder; (3) Membangun desain rencana teknis (protocol) dalam implementasi pemanfaatan WP3K sesuai zonasi dan (4) Pemulihan ekosistem kritis, dan (5) Mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K.

### 1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung percepatan pelaksanaan RZWP3K Provinsi Papua Barat dan KKP/KKPD di Provinsi Papua Barat, pada khususnya Kabupaten Raja Ampat. Adapun sasaran dari kegiatan antara lain:

1. Efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut.
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir terpadu.
3. Pemulihan ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas proyek
5. Terlaksananya kegiatan proyek Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat.

### 1.3 Ruang Lingkup pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut, melalui pengembangan dan implementasi system monitoring dan evaluasi implementasi RZWP3K serta penyusunan platform tata Kelola pesisir terpadu
2. Penyusunan rencana teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pariwisata

3. Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi
4. Pemulihan ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui rehabilitasi
5. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas proyek

#### 1.4 Metodologi

Pendekatan utama dalam implementasi program ini dijalankan melalui Pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated coastal zone management - ICZM), dimana ada empat hal pokok strategis yang dijalankan, yaitu:

1. Pendekatan keterpaduan dengan berbasis pada ekosistem (ecosystem based);
2. Berbasis keilmuan (Scientific based);
3. Pendekatan partisipatif (Participatory approach)
4. Pengelolaan berbasis masyarakat (Community based management - CBM).

Untuk menjalankan kegiatan ini, metode yang digunakan disesuaikan dengan masing-masing tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membangun efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut, dilakukan dengan kerangka kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui konsensus mekanisme kerjasama yang dibangun melalui Workshop, FGD dan perencanaan kolaboratif;
2. Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir terpadu dilakukan dengan pelatihan, workshop, studi lapang dan proses pembelajaran langsung di alam;
3. Pemulihan ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan community based rehabilitation, yang metode pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan situasi lokasi;
4. Untuk mendesain sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K akan menggunakan metode MCS dengan pendekatan partisipatif dari seluruh pemangku kepentingan, dengan prinsip transparent, simple and aplicapble.

#### 1.5 Informasi Ringkas Organisasi dan proyek

Nama Proyek: Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat	
Durasi Proyek:	Bulan Agustus 2020 – Bulan Februari 2022
Lokasi Proyek/Kegiatan	Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat
Total Hibah Dari ICCTF	Rp 3.090.636.445
Dana hibah yang sudah diterima	Rp 3.090.636.445
Dana hibah ICCTF yang sudah digunakan	Rp 2.974.340.972
Jumlah penerima manfaat langsung	636
Jumlah penerima manfaat tidak langsung	1000
Nama organisasi/lembaga/ perguruan tinggi (unit)	Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan – Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB)
Direktur Organisasi/lembaga/Unit Perguruan Tinggi	Ario Damar
Manajer proyek	Fery Kurniawan

## 2 PELAKSANAAN PROGRAM

### 2.1 Kerangka Kerja (Logical Framework)

Berikut merupakan tabel yang menyajikan tentang tujuan, output, indikator/target, dan asumsi penting (risiko dan mitigasi) dari Paket 4.

Tabel 1 Kerangka kerja (*Logical Framework*) Paket 4

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
<p><b>Tujuan (<i>Outcome</i>):</b> Mendukung percepatan pelaksanaan RZWP-3-K Provinsi Papua Barat dan KKP/KKPD di Provinsi Papua Barat, pada khususnya Kabupaten Raja Ampat.</p>	<p>Indikator tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir terpadu.</li> <li>3. Pemulihan ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> <li>4. Terlaksananya kegiatan dalam rencana aksi ICZM di Papua Barat</li> </ol> <p>Target tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya sistem pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut yang efektif untuk zonasi WP-3-K dan KKP.</li> <li>2. Dua puluh lima persen pemangku kepentingan pada kelompok target mengalami peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pesisir berdasarkan data dasar tahun 2020</li> <li>3. Dua puluh lima persen luasan ekosistem kritis yang terehabilitasi di lokasi demoplot mengalami pemulihan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen-dokumen pendukung pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut yang efektif</li> <li>2. Dokumentasi laporan-laporan kegiatan dan evaluasi</li> <li>3. Laporan monitoring dan evaluasi keproyekan</li> </ol>	<p>Risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim pokja RZWP-3-K sudah tidak bekerja lagi, sehingga hal-hal yang dapat mendukung percepatan pelaksanaan RZWP-3-K Provinsi Papua Barat dan KKP/KKPD di Provinsi Papua Barat, pada khususnya Kabupaten Raja Ampat tidak berjalan optimal. Selain itu, implementasi RZWP-3-K belum menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pesisir dterintegrasi. Keterbatasan waktu dalam memutuskan kesepakatan akan menghambat capaian output berikutnya.</li> <li>2. Sasaran peserta yang ikut tidak sesuai dengan yang yang ditargetkan.</li> <li>3. Tingkat keberhasilan (<i>survival rate</i>) rehabilitasi rendah lipa karena faktor alam.</li> </ol> <p>Mitigasi:</p>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
	4. Delapan belas kegiatan utama proyek yang merupakan bagian dari rencana aksi ICZM di Papua Barat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem koordinasi dan komunikasi yang baik dan mengoptimalkan peran mitra lokal</li> <li>2. Ada mekanisme seleksi dan prasyarat untuk menjadi peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan kajian awal dan akhir kapasitas pemangku kepentingan</li> <li>3. Melakukan kajian awal untuk menentukan lokasi, waktu dan metode yang sesuai, dan melakukan kerjasama dengan proponent lain</li> </ol>
<p><b>Sasaran/outcome:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pemangku kepentingan dalam pengelolaan</li> </ol>	<p>Indikator sasaran/outcome:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Tersusunnya satu platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) yang berisi aturan dan prosedur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Papua Barat.</li> <li>1.2. Tersusunnya satu rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K.</li> <li>1.3. Tersusunnya satu rencana teknis pemanfaatan di Kawasan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Dokumen platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) yang berisi aturan dan prosedur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Papua Barat dan laporan kegiatan</li> <li>1.2. Dokumen rencana rencana teknis implementasi RZWP-3-K dan laporan kegiatan.</li> <li>1.3. Dokumen rencana teknis pemanfaatan berdasarkan daya dukung di Kawasan Konservasi</li> </ol> </li> </ol>	<p>Resiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa resiko yang mungkin terjadi untuk meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut, di antaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Belum samanya pemahaman antar pemangku kepentingan dan sulitnya komunikasi dengan pemangku kepentingan dan</li> </ol> </li> </ol>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
<p>3. Pemulihan ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>4. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas proyek</p> <p>5. Terlaksananya kegiatan proyek Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat</p>	<p>Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung.</p> <p>1.4. Terbangun dan terimplementasikannya satu sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K, serta satu <i>manual guidance</i></p> <p>2. Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi.</p> <p>2.1. Terlaksananya lima kegiatan peningkatan kapasitas di lokasi target</p> <p>2.2. Tersedianya data dasar tentang kapasitas para pemangku kepentingan untuk setiap materi yang dilatihkan</p> <p>2.3. Seratus tujuh belas orang, yang terdiri dari 82 pemangku kepentingan dan 35 masyarakat yang menerima akan pengetahuan dan ketrampilan</p> <p>2.4. Dua puluh lima persen pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan ketrampilan baru akibat dari intervensi program</p> <p>3. Pulihnya ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	<p>Perairan (KKP) target dan laporan kegiatan.</p> <p>1.4. Sistem mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K berbasis web dan/atau Apps dan satu <i>manual guidance</i> untuk penggunaan dan pemeliharaan dan laporan kegiatan.</p> <p>2. Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi</p> <p>2.1. Dokumentasi dan laporan kegiatan pengembangan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi.</p> <p>2.2. Dokumen kegiatan berisi data dasar kapasitas pemangku kepentingan</p> <p>2.3. Daftar peserta beserta biodata peserta</p> <p>2.4. Pre-test dan post-test pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan</p> <p>3. Pulihnya ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:</p>	<p>waktu penyelesaian pekerjaan</p> <p>1.2. Kurangnya informasi dari kabupaten lain di luar Raja Ampat</p> <p>1.3. Minimnya ketersediaan data dan informasi dan menudukung analisis</p> <p>1.4. Sistem monitoring sulit diterapkan untuk semua zona dan wilayah</p> <p>2. Beberapa resiko yang mungkin terjadi untuk mengembangkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi, di antaranya:</p> <p>2.1. Adanya perubahan agenda di daerah</p> <p>2.2. Sasaran peserta yang ikut tidak sesuai dengan yang yang ditargetkan dan monitoring</p> <p>2.3. Tidak ada resiko</p>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
	<p>3.1. Tersedianya data dasar atau hasil kajian cepat tentang ekosistem kritis yang ada di lokasi target</p> <p>3.2. Seratus lima puluh meter persegi (ekuivalen) terumbu karang, satu hektar (ekuivalen) mangrove, lima ratus meter persegi (ekuivalen) lamun sebagai ekosistem kritis yang direhabilitasi yang juga sebagai demoplot/penelitian untuk metode rehabilitasi (rehabilitasi berbasis pengetahuan)</p> <p>3.3. Enam puluh pemangku kepentingan yang mendapatkan pengalaman dalam rehabilitasi ekosistem pesisir</p> <p>3.4. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pemeliharaan ekosistem yang direhabilitasi minimal tiga kali dalam setahun</p> <p>3.5. Dua ribu lima ratus masyarakat yang akan terpapar langsung informasi melalui kegiatan penyadartahuan dan aksi pelestarian ekosistem</p> <p>3.6. Adanya diseminasi kegiatan rehabilitasi melalui kegiatan media visit atau kegiatan diseminasi lainnya melalui media massa cetak atau online</p>	<p>3.1. Dokumen data dasar atau kajian cepat tentang kondisi ekosistem kritis yang ada di lokasi target</p> <p>3.2. Dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan demoplot/penelitian untuk metode rehabilitasi ekosistem kritis, pemantauan dan pemeliharaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di area terpilih.</p> <p>3.3. Dokumen dan laporan hasil kegiatan pemantauan dan pemeliharaan ekosistem kritis yang direhabilitasi 3x dalam setahun</p> <p>3.4. Laporan kegiatan penyadartahuan</p> <p>3.5. Laporan dan dokumentasi kegiatan diseminasi</p> <p>4. Laporan monev</p> <p>4.1. Laporan monev (<i>monthly, quarterly, annual</i>)</p> <p>4.2. Laporan procurement , laporan bulanan konsultan</p> <p>4.3. Bahan publikasi</p> <p>4.4. Laporan kegiatan</p>	<p>2.4. Tidak tercapainya target 25% peningkatan kapasitas</p> <p>3. Beberapa resiko yang mungkin terjadi dalam upaya pemulihan ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di antaranya:</p> <p>3.1. Luasnya lokasi yang harus dikaji</p> <p>3.2. Tingkat keberhasilan (<i>survival rate</i>) rehabilitasi rendah karena faktor alam, bibit dan teknik penanaman dan pemeliharaan</p> <p>3.3. Tidak ada resiko</p> <p>3.4. Pemantauan dan pemeliharaan tidak terlaksana dengan baik</p> <p>3.5. Tidak tercapainya target keterpaparan masyarakat</p> <p>3.6. Publikasi tidak sesuai dengan target yang dibuat</p> <p>4. Tertundanya pelaksanaan monev, evaluasi dan</p>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.7. Tersedianya material komunikasi dan publikasi proyek</li> <li>4. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas proyek               <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Tersedianya personil pendukung</li> <li>4.2. Terlaksananya regular monev programmatic</li> <li>4.3. Terlaksananya spotcheck (finance monitoring)</li> <li>4.4. Terlaksananya audit internal dan external</li> <li>4.5. Terlaksananya mid term workshop</li> <li>4.6. Terlaksananya annual/project closing workshop</li> </ul> </li> <li>5. Terlaksananya kegiatan proyek Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat               <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1. Tersedianya tenaga ahli yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kegiatan</li> <li>5.2. Adanya publikasi tentang kegiatan proyek</li> <li>5.3. Terlaksananya koordinasi dan operasional proyek</li> </ul> </li> </ul>		<p>pengendalian kualitas proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Beberapa resiko yang mungkin terjadi pelaksanaan proyek ini, diantaranya:           <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1. Tenaga ahli kurang menjawab output yang ditargetkan</li> <li>5.2. Kegiatan tidak terpublikasi secara sistematis</li> <li>5.3. Koordinasi dan operasional proyek terhambat</li> </ul> </li> </ul> <p>Mitigasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mitigasi yang dapat dilakukan pada indikator dan target ini, di antaranya:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Membentuk koordinator provinsi dan meningkatkan intensitas koordinasi dengan pengangku kepentingan</li> <li>1.2. Mengoptimalkan peran pengaku kepentingan dari kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua Barat pada setiap koordinasi</li> </ul> </li> </ul>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
			<ul style="list-style-type: none"> <li>1.3. Pelibatan aktif pengelola kawasan konservasi perairan di pusat dan daerah dan pihak-pihak terkait</li> <li>1.4. Pelibatan aktif pelaksana sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K dari semua lembaga terkait di daerah</li> <li>2. Membuat standarisasi data secara komprehensif Mitigasi yang dapat dilakukan pada indikator dan target ini, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Mensinkronkan waktu pelaksanaan program dengan agenda program kerja pemerintah daerah</li> <li>2.2. Ada mekanisme seleksi dan prasyarat untuk menjadi peserta kegiatan peningkatan kapasitas</li> <li>2.3. Tidak ada mitigasi yang perlu dilakukan</li> <li>2.4. Menerapkan metode dan pendekatan</li> </ul> </li> </ul>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
			<p>peningkatan kapasitas peserta sesuai</p> <p>3. Mitigasi yang dapat dilakukan pada indikator dan target ini, di antaranya:</p> <p>3.1. <i>Desk study</i> dan kerjasama dengan pihak yang pernah melakukan studi di lokasi kajian</p> <p>3.2. Rehabilitasi dilakukan pada lokasi, waktu dan metode yang sesuai, dan melakukan kerjasama dengan proponent lain</p> <p>3.3. Tidak membutuhkan mitigasi</p> <p>3.4. Pendampingan dan membuat pedoman teknis untuk pemantauan dan pemeliharaan</p> <p>3.5. Metode (media) penyadartahuan disesuaikan dengan lokalitas</p> <p>3.6. Memilih media partner yang sesuai dan memahami isu-isu pesisir, serta</p>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
			<p>melakukan komunikasi yang baik dengan media</p> <p>4. Membentuk monev officer khusus yang independen di luar kegiatan program</p> <p>5. Mitigasi yang dapat dilakukan pada indikator dan target ini, di antaranya:</p> <p>5.1. Proses rekrutmen berdasarkan merit sistem</p> <p>5.2. Membentuk tim komunikasi proyek</p> <p>5.3. Membangun skenario koordinasi dan operasional kegiatan yang adaptif</p>
<b>Keluaran (Output):</b>			
<p><b>Keluaran 1.1.</b> Platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) yang berisi aturan dan prosedur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya satu dokumen platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM)</li> <li>2. Terlaksananya satu kali ICZM <i>Leader Forum</i> di Provinsi Papua Barat</li> <li>3. Sejumlah 30 pemangku kepentingan yang mendapatkan pelatihan tentang platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM)</li> <li>4. Tersusunnya satu dokumen strategi keberlanjutan ICZM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu buku platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM)</li> <li>2. Dokumentasi dan laporan kegiatan ICZM <i>Leader Forum</i> di Provinsi Papua Barat</li> <li>3. Dokumentasi dan laporan kegiatan pelatihan implementasi platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM)</li> <li>4. Dokumen Strategi Keberlanjutan Program ICZM</li> </ol>	<p>Resiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM)</li> <li>2. Peserta yang mengikuti ICZM <i>Leader Forum</i> bukan level pimpinan OPD/instansi/institusi</li> <li>3. Peserta yang hadir dalam pelatihan tidak sesuai</li> </ol>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
			<p>dengan kriteria yang diharapkan</p> <p>4. Ketidaksinkronan jadwal proyek dengan agenda pemangku kepentingan terkait</p> <p>Mitigasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisir kebutuhan data yang harus disiapkan</li> <li>2. Berkoordinasi dengan DKP Papua Barat dan Bappeda dalam menyiapkan ICZM leader forum</li> <li>3. Berkoordinasi dengan stakeholder untuk menyiapkan kriteria peserta</li> <li>4. Mensosialisasikan dan menyesuaikan agenda dengan stakeholder terkait</li> </ol>
<p><b>Keluaran 1.2.</b> Rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya satu buku rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K</li> </ol>	<p>Risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan data dan informasi serta keterlambatan tim dalam menyusun rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K</li> </ol> <p>Mitigasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisir kebutuhan data yang harus disiapkan dan membuat agenda kerja yang harus disepakati untuk</li> </ol>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
			memantau penyusunan dokumen agar tepat waktu
<p><b>Keluaran 1.3.</b> Rencana teknis pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya satu buku rencana teknis wisata dan perikanan (penangkapan dan budidaya laut) di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung</li> <li>2. SOP wisata, penangkapan dan budidaya laut yang minimal ditetapkan oleh Kepala Pengelola KKP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku rencana teknis pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung</li> <li>2. Dokumen SOP</li> </ol>	<p>Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya data yang dibutuhkan dan cuaca yang kurang mendukung, sehingga menghambat proses pengambilan data di lapangan,</li> </ol> <p>Mitigasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan kebutuhan data yang akan dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder dan berkoordinasi dengan Pemda (Provinsi dan Kabupaten) terkait, serta survei dilakukan dengan mempertimbangkan pola cuaca yang ada, mengoptimalkan mitra lokal, serta menyiapkan durasi waktu survei yang panjang.</li> </ol>
<p><b>Keluaran 1.4.</b> Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K yang dibangun dan diimplementasikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K</li> <li>2. Satu pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K</li> <li>3. Lima puluh orang (Staff daerah/staff pusat) yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan sistem dan pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K website atau aplikasi</li> <li>2. Buku pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K</li> <li>3. Dokumentasi dan laporan kegiatan workshop pembuatan sistem dan pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K</li> </ol>	<p>Risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidaktepatan memilih tenaga ahli sehingga kesulitan dalam membangun sistem monitoring</li> <li>2. Pedoman kurang jelas dalam memandu pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi</li> <li>3. Ketidaktepatan peserta yang hadir sehingga tidak</li> </ol>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
	<p>4. Terlaksananya diseminasi sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K dan empat puluh lima orang terlatih dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RZWP-3-K</p> <p>5. Terlaksananya uji coba dan pendampingan implementasi sistem monitoring dan evaluasi dan implementasi RZWP-3-K</p> <p>6. Tersusunnya satu buku <i>leasson learned</i> implementasi sistem monitoring dan evaluasi dan implementasi RZWP-3-K</p>	<p>4. Dokumentasi dan laporan kegiatan diseminasi dan pelatihan sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K</p> <p>5. Dokumentasi dan laporan kegiatan uji coba dan pendampingan implementasi sistem monitoring dan evaluasi dan implementasi RZWP-3-K</p> <p>6. Buku <i>leasson learned</i> implementasi sistem monitoring dan evaluasi dan implementasi RZWP-3-K</p>	<p>memberikan <i>feedback</i> positif terhadap muatan sistem yang dibangun</p> <p>4. Substansi pengetahuan dalam sistem kurang dapat diterima oleh peserta akibat pemahaman yang seimbang antar peserta</p> <p>5. Ketidaktepatan peserta yang dikirim instansi sehingga kurang dapat menjadi bridging penerapan system sistem yang dibangun</p> <p>6. Kesulitan teknis dalam menjalankan sistem akibat keterbatasan teknologi</p> <p>7. Terlambatnya waktu penyelesaian</p> <p>Mitigasinya:</p> <p>1. Melakukan seleksi yang ketat dengan merit system dan memberikan pembekalan orientasi yang lengkap kepada tenaga ahli</p> <p>2. Pedoman disusun lengkap dan detil berdasarkan muatan sistem, dan sebelum disahkan, didiseminasikan terlebih dahulu konsep awal kepada seluas-luasnya pihak dan meminta <i>feedback</i> dari pemangku kepentingan</p>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peserta yang hadir mewakili instansi akan diberikan kriteria yang jelas</li> <li>4. Tim akan membuat materi substansi diseminasi yang mudah dipahami dan komprehensif serta metode diseminasi yang tepat</li> <li>5. Peserta pelatihan harus memenuhi kriteria yang ketat dan pelatihannya menggunakan pendekatan dan metode yang paling mudah</li> <li>6. Sistem dibuat dalam format atau sistem yang sederhana, dan disesuaikan kondisi wilayah Papua Barat</li> <li>7. Target penyelesaian dibuat lebih awal dengan menyediakan fasilitas penyelesaian</li> </ol>
<p><b>Keluaran 2.1.</b> Pemangku kepentingan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata,</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiga puluh orang (staff daerah/staff pusat) mendapatkan pelatihan SIG dan tata ruang pesisir (<i>coatal zone planning</i>) dengan peningkatan kemampuan 75%</li> <li>2. Minimal empat orang mengikuti workshop/pelatihan/seminar internasional terkait ICZM, <i>coastal spatial planning</i>, konservasi, dan/atau terkait lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi dan laporan setiap kegiatan</li> <li>2. Hasil pre- and post-test dan evaluasi lainnya</li> <li>3. Modul-modul pelatihan</li> </ol>	<p>Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga ahli kurang menjawab output yang ditargetkan sehingga <i>debursment</i> honor terlambat</li> <li>2. Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai jadwal yang direncanakan dan pencapaian tujuan pelatihan tidak sesuai sasaran Pelatihan</li> </ol>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
perikanan dan/atau konservasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tiga puluh orang pemangku kepentingan (staff daerah/staff pusat) mengikuti pelatihan dan workshop ICZM</li> <li>4. Dua puluh fasilitator (staff daerah/satf pusat) mengikuti <i>training of trainer</i> (TOT) dan training workshop fasiltator ICZM di Jakarta</li> <li>5. Tiga puluh lima masyarakat lokal mengikuti pelatihan ICZM untuk masyarakat lokal</li> <li>6. Dua workshop tentang pengelolaan perikanan sebagai bagian dari pengelolaan zona pesisir terpadu terlaksana</li> <li>7. Dua puluh orang staff nasional dan subnasional mengikuti Pelatihan/kursus singkat tentang bioekonomi analysis untuk meningkatkan praktek pengelolaan perikanan</li> </ol>		<p>SIG dan tata ruang pesisir (<i>coatal zone planning</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Terlambatnya kesempatan mengikuti seleksi pendaftaran dan kurangnya kemampuan bahasa peserta dalam mengikuti workshop/ pelatihan/ seminar International terkait IZCM, coastal spatial planning, konservasi, dan/atau terkait lainnya.</li> <li>4. Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai jadwal yang direncanakan dan Pencapaian tujuan pelatihan tidak sesuai sasaran training dan workshop ICZM pemangku kepentingan terkait</li> <li>5. Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai jadwal yang direncanakan dan Pencapaian tujuan pelatihan tidak sesuai sasaran <i>Training of trainer</i> (TOT) dan training workshop fasiltator ICZM</li> <li>6. Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai jadwal yang direncanakan dan Pencapaian tujuan pelatihan tidak sesuai sasaran</li> </ol>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
			<p>Pelatihan ICZM untuk masyarakat lokal</p> <p>Mitigasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Prosedur procurement tenaga ahli/konsultan berdasarkan kualifikasi, serta control /monev output kerja dilakukan secara ketat</li> <li>2. Mensinkronkan waktu pelaksanaan program dengan agenda program kerja pemerintah daerah dan ada mekanisme seleksi dan prasyarat untuk menjadi peserta kegiatan Pelatihan GIS dan tata ruang pesisir serta menerapkan metode dan pendekatan peningkatan kapasitas peserta sesuai</li> <li>3. Mencari informasi dan mengidentifikasi agenda seminar dan training intersional dengan baik dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris calon peserta</li> <li>4. Mensinkronkan waktu pelaksanaan program dengan agenda program kerja pemerintah daerah dan ada mekanisme seleksi dan prasyarat untuk menjadi</li> </ol>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
			<p>peserta kegiatan Training dan workshop ICZM pemangku kepentingan terkait serta menerapkan metode dan pendekatan peningkatan kapasitas peserta sesuai</p> <p>5. Mensinkronkan waktu pelaksanaan program dengan agenda program kerja pemerintah daerah dan ada mekanisme seleksi dan prasyarat untuk menjadi peserta kegiatan <i>Training of trainer</i> (TOT) dan training workshop fasilitator ICZM serta menerapkan metode dan pendekatan peningkatan kapasitas peserta sesuai</p> <p>6. Mensinkronkan waktu pelaksanaan program dengan agenda program kerja pemerintah daerah dan ada mekanisme seleksi dan prasyarat untuk menjadi peserta kegiatan Pelatihan ICZM untuk masyarakat local serta menerapkan metode dan pendekatan peningkatan kapasitas peserta sesuai</p>
<p><b>Keluaran 3.1.</b> Ekosistem pesisir (mangrove, lamun,</p>	<p>1. Satu dokumen studi mendalam penilaian kondisi ekosistem kritis dan metode rehabilitasi</p>	<p>1. Laporan hasil studi mendalam penilaian kondisi ekosistem kritis dan metode rehabilitasi</p>	<p>Resiko:</p> <p>1. Terhambatnya pelaksanaan survei karena faktor cuaca,</p>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
dan/atau terumbu karang) yang direhabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tiga kelompok konservasi dan rehabilitasi ekosistem kritis di masyarakat terbentuk</li> <li>3. Seribu enam ratus bibit dalam seratus meter persegi (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem terumbu karang terehabilitasi</li> <li>4. Lima ribu bibit dalam satu hektar (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem mangrove terehabilitasi</li> <li>5. Lima ratus rumpun bibit dalam lima ratus meter persegi (ekuivalen) wilayah ekosistem lamun terehabilitasi</li> <li>6. Satu dokumen laporan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan kawasan rehabilitasi</li> <li>7. Satu buku <i>leasson learned</i> program rehabilitasi ekosistem kritis tersusun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Surat keputusan kelompok masyarakat pelaksana konservasi dan rehabilitasi ekosistem kritis minimal pada level kampung</li> <li>3. Dokumentasi dan laporan kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang</li> <li>4. Dokumentasi dan laporan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove</li> <li>5. Dokumentasi dan laporan kegiatan rehabilitasi ekosistem lamun</li> <li>6. Dokumentasi dan laporan hasil pengawasan dan pemeliharaan kawasan rehabilitasi</li> <li>7. Buku <i>leasson learned</i> program rehabilitasi ekosistem kritis</li> </ol>	<p>equipment, dan teknis lainnya, dan belum adanya pedoman baku rehabilitasi ekosistem pesisir kritis yang dapat diadopsi berdasarkan aspek-aspek kesesuaian lokasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rendahnya tingkat kemauan masyarakat untuk ikut aktif berkelompok dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi</li> <li>3. Rendahnya tingkat hidup bibit yang ditanam dalam kegiatan rehabilitasi</li> <li>4. Matinya bibit yang ditanam karena kurangnya atau tidak tepatnya proses pengawasan dan pemeliharaan</li> <li>5. Terlambatnya penyelesaian buku pembelajaran</li> </ol> <p>Mitigasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi mendalam penilaian kondisi, pemilihan ekosistem dan lokasi, dan metode rehabilitasi dilaksanakan dengan memperkirakan rencana survei dengan baik, memaksimalkan mitra lokal dan data studi-studi sebelumnya, sehingga dapat menyusun atau</li> </ol>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
			<p>menyempurnakan pedoman pelaksanaan rehabilitasi yang sesuai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Membentuk kelompok konservasi dan rehabilitasi ekosistem dan proses peningkatan kapasitas sangat perlu dan dilakukan secara perlahan dan berkala. Selain itu, upaya peningkatan akan dilakukan oleh fasilitator yang berpengalaman</li> <li>3. Rehabilitasi akan didampingi langsung oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman di masing-masing ekosistem</li> <li>4. Perawatan dan pemeliharaan didampi oleh tenaga ahli dan dilakukan secara intensif dengan pelibatan langsung masyarakat</li> <li>5. Menyediakan fasilitas pendukung untuk penyelesaian buku kepada tim penyusun</li> </ol>
<p><b>Keluaran 3.2.</b> Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui program</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dua ribu lima ratus masyarakat yang terpapar informasi dari kegiatan kampanye publik tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya pesisir dan lautan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi, laporan kegiatan, dan dokumen bahan-bahan dan materi publikasi, dan video kampanye</li> <li>2. Dokumentasi dan laporan kegiatan bersih pantai</li> </ol>	<p>Resiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang pahamnya masyarakat terhadap kampanye publik</li> </ol>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
<p>penyadartahuan serta kegiatan publikasi dan komunikasi proyek yang dilaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dua ratus empat puluh orang terlibat dalam aksi bersih pantai</li> <li>3. Adanya dua kali media trip yang dilaksanakan dengan publikasi di media</li> <li>4. Tersedianya material komunikasi dan publikasi proyek</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Laporan kegiatan dan publikasi di media massa</li> <li>4. Multimedia dan material cetak terkait proyek</li> </ol>	<p>penyadartahuan yang dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam aksi bersih pantai</li> <li>3. Sulitnya mendapatkan media yang fokus dalam isu-isu pesisir yang mau terlibat</li> </ol> <p>Mitigasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat metode kampanye yang menarik dan sesuai dengan lokalitas di Papua Barat</li> <li>2. Memaksimalkan peran tokoh lokal dan kelompok masyarakat</li> <li>3. Membangun komunikasi sejak awal proyek dengan media target dan membangun isu-isu penting tentang pesisir</li> </ol>
<p><b>Keluaran 4.1.</b> Dukungan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas proyek</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusun dan tersedianya laporan berkala proyek</li> <li>2. Terlaksananya workshop mid evaluasi dan annual</li> <li>3. Tersedianya dukungan untuk proses audit</li> <li>4. Dokumen pembelajaran proyek/praktek terbaik</li> <li>5. Tersedianya tim lapangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan monitoring dan evaluasi proyek berkala</li> <li>2. Laporan workshop</li> <li>3. Laporan kegiatan pendampingan audit</li> </ol>	<p>Resiko: Tertundanya pelaksanaan monev, evaluasi dan pengendalian kualitas proyek</p> <p>Mitigasi: Membentuk monev officer khusus yang independen di luar kegiatan program</p>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
<p><b>Keluaran 5.1.</b> Dukungan kegiatan proyek Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultan yang membantu implementasi proyek dapat tersedia</li> <li>2. Publikasi dan hasil-hasil kegiatan yang terdiseminasi dengan baik</li> <li>3. Lancarnya dukungan operasional untuk implementasi proyek</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan dan dokumentasi proses pemilihan konsultan</li> <li>2. Laporan Kerja Konsultan</li> <li>3. Laporan publikasi dan diseminasi hasil proyek</li> </ol>	<p>Risiko: Secara umum risiko proyek ini adalah kemungkinan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan agenda yang dijadwalkan, karena itu pelaksanaan kegiatan membutuhkan inisiasi yang intensif dengan mitra lain sebagai bagian kemitraan strategis jangka panjang, untuk itu akan dilakukan komunikasi yang intensif dengan semua pihak mulai tingkat nasional, regional (Papua barat) dan lokal di Raja Ampat. Secara terperinci, risiko yang mungkin timbul adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi keproyekan tidak berjalan baik karena salah kelola (<i>miss management</i>)</li> <li>2. Tenaga ahli kurang menjawab output yang ditargetkan sehingga <i>debursment</i> honor terlambat</li> <li>3. Kegiatan tidak terpublikasi kurang mencapai target sasaran</li> <li>4. Koordinasi dan konsolidasi target proyek ditingkat nasional dan provinsi serta lokal terhambat dan tidak tercapai sesuai jadwal</li> </ol>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
			<p>karena perbedaan alokasi waktu pemangku kepentingan</p> <p>Mitigasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekrut <i>Monev officer</i> yang berpengalaman dengan dukungan tenaga administrasi dan finansial yang handal dan berpengalaman mengelola proyek sejenis</li> <li>2. Menyusun prosedur <i>procurement</i> tenaga ahli/konsultan berdasarkan kualifikasi, serta kontrol /monev output kerja dilakukan secara ketat</li> <li>3. Merekrut konsultan komunikasi yang handal, yang sekaligus dapat mendukung pencapaian output 2 (kampanye kesadaran publik) dengan dikoordinir oleh <i>Knowledge Management Manager</i></li> <li>4. Merekrut <i>Project director, Program manager, Officer</i> administrasi dan finansial yang berpengalaman untuk mengelola seluruh dukungan serta membangun mekanisme koordinasi dengan ICCTF dan koordinasi rutin dengan mitra</li> </ol>

Uraian Singkat	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting
			nasional , regional provinsi dan lokal secara rutin melalui tim koordinasi terpadu ICM

## 2.2. Kemajuan dan Pencapaian Masing-masing Output

Berikut merupakan Tabel yang menunjukkan kemajuan dan capaian masing-masing output secara keseluruhan

Tabel 2 Kemajuan dan capaian masing-masing output secara keseluruhan

Output	Bobot Output	Indikator dan Target	Kemajuan	Capaian Indikator (%)	Capaian Output (%)
<b>Output 1.1</b>					
<b>Platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) yang berisi aturan dan prosedur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</b>	<b>15</b>	Tersusunnya satu dokumen platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM)	Tersedianya satu dokumen platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM)	<b>100</b>	<b>15</b>
		Terlaksananya satu kali ICZM Leader Forum di Provinsi Papua Barat	Terlaksananya kegiatan ICZM Leader Forum di Manokwari. Forum ini dihadiri oleh berbagai stakeholders terkait secara online dan offline yang terdiri dari: (i) Pemerintah Daerah Papua Barat (ii) Direktorat Jenderal KSDA Kementerian BPN/Bappenas; (iii) Rektor IPB University dan kepala PKSPL LPPM IPB; (iv) UNIPA; (v) ICCTF; (vi) University of Rhode Island (vii) University Utara Malaysia (viii) Perwakilan OPD Provinsi Papua Barat; (ix) Perwakilan OPD Kabupaten Raja Ampat; dan (x) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP. Kegiatan ini bertujuan untuk:		

			<p>1. Menyamakan persepsi para leader dalam bidang pengelolaan pesisir dan laut sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dan dapat mengaplikasikan kerangka (frame work) ICM dan membantu pemerintah daerah dalam percepatan Implementasi pelaksanaan RZWP-3-K.</p> <p>2. Mendapatkan komitmen dari Pemerintah daerah Papua Barat untuk dapat mendukung program ICZM dalam percepatan implementasi pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat dan dimasukkan dalam RPJMD mewujudkan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir dan laut Provinsi Papua Barat.</p>		
		<p>Sejumlah 30 pemangku kepentingan yang mendapatkan pelatihan tentang platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM)</p>	<p>Terlaksananya workshop implementasi platform ICZM di Provinsi Papua Barat. Workshop ini dihadiri oleh: (i) Instansi di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat; (ii) Instansi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari; (iii) Instansi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Raja Ampat; (iv) Instansi di Lingkup Pemerintah Kota Sorong; (v) Bappenas; (vi) Kementerian Kelautan Perikanan; (vii) Organisasi Kemasyarakatan, Universitas, dan Kelompok Masyarakat; dan (viii) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>Kegiatan ini bertujuan untuk:</p> <p>1. Menyampaikan konsep platform ICZM Provinsi Papua Barat, menyepakatinya bersama stakeholder dan mengumpulkan masukan dan informasi tambahan dari stakeholder terkait sebagai bahan penyempurnaan laporan akhir platform.</p> <p>2. Mensosialisasikan konsepsi platform ICZM, memberi pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan tentang pengelolaan pesisir terpadu khususnya dalam implementasi</p>		

			platform ICZM untuk mendukung percepatan pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat.		
		Tersusunnya satu dokumen strategi keberlanjutan ICZM	Telah tersusunnya dokumen strategi keberlanjutan ICZM. Penyusunan dokumen ini berkoordinasi dengan stakeholder terkait yang dapat mendukung keberlanjutan program setelah kegiatan “Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat” selesai.		
<b>Output 1.2</b>					
<b>Rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K</b>	<b>7,5</b>	Tersedianya satu buku rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K	Tersedianya buku rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K	<b>100</b>	<b>7,5</b>
<b>Output 1.3</b>					
<b>Rencana teknis pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung</b>	<b>7,5</b>	Tersedianya satu buku rencana teknis wisata dan perikanan (penangkapan dan budidaya laut) di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung	Tersedianya buku rencana teknis wisata dan perikanan (penangkapan dan budidaya laut) di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung.	<b>100</b>	<b>7</b>

		SOP wisata, penangkapan dan budidaya laut yang minimal ditetapkan oleh Kepala Pengelola KKP	Adanya draft SOP wisata, penangkapan dan budidaya laut yang minimal ditetapkan oleh Kepala Pengelola KKP	<b>70</b>	
<b>Output 1.4</b>					
<b>Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K yang dibangun dan diimplementasikan</b>	<b>10</b>	Tersedianya satu sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K	Telah tersedianya sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K website atau aplikasi yang dapat diakses pada: <a href="https://simona.pksplipb.or.id/">https://simona.pksplipb.or.id/</a> dan diunduh pada play store dengan nama aplikasi SIMONA.	<b>100</b>	<b>10</b>
		Satu pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K	Telah tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K		
		Lima puluh orang (Staff daerah/staff pusat) yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan sistem dan pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K	Lima puluh orang (Staff daerah/staff pusat) telah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan sistem dan pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K		
		Terlaksananya diseminasi sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K dan empat puluh lima orang terlatih dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RZWP-3-K	Tersedianya dokumentasi dan laporan kegiatan diseminasi dan pelatihan sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K.		

		Terlaksananya uji coba dan pendampingan implementasi sistem monitoring dan evaluasi dan implementasi RZWP-3-K	Adanya dokumentasi dan laporan kegiatan uji coba dan pendampingan implementasi sistem monitoring dan evaluasi dan implementasi RZWP-3-K.		
		Tersusunnya satu buku leasson learned implementasi sistem monitoring dan evaluasi dan implementasi RZWP-3-K	Adanya satu buku leasson learned implementasi sistem monitoring dan evaluasi dan implementasi RZWP-3-K.		
<b>Output 2.1</b>					
<b>Pemangku kepentingan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi</b>	<b>30</b>	Tiga puluh orang (staff daerah/staff pusat) mendapatkan pelatihan SIG dan tata ruang pesisir (coastal zone planning) dengan peningkatan kemampuan 75%	Terlaksananya kegiatan pelatihan SIG dan tata ruang pesisir (coastal zone planning) di Manokwari. Acara tersebut dihadiri hybrid oleh 47 yang melibupti 31 peserta offline dan 16 peserta online. Peserta berasal dari berbagai instansi pemerintah baik di lingkup kabupaten maupun provinsi di Papua Barat. Capaian peningkatan kemampuan peserta pelatihan adalah 80%.	<b>100</b>	<b>30</b>
		Minimal empat orang mengikuti workshop/pelatihan/seminar internasional terkait ICZM, coastal spatial planning, konservasi, dan/atau terkait lainnya	3 orang peserta mengikuti pelatihan ICM and MSP: Moving Beyond Planning for Sustainable Development of Coastal and Marine Areas in the East Asian Region oleh Fujian Institute for Sustainable Oceans (Xiamen University) Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) secara online pada tanggal 14 – 17 September 2021 Peserta berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB.		

			4 orang peserta mengikuti International Conference on Integrated Coastal Management and Marine Biotechnology secara online pada tanggal 11-12 Agustus 2021. Pada kegiatan conference ini peserta yang ikut sebagai pemakalah sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari PKSPL IPB dan Tenaga Ahli Proyek paket 4 COREMAP CTI.		
		Tiga puluh lima masyarakat lokal mengikuti pelatihan ICZM untuk masyarakat lokal	Sudah terlaksananya pelatihan ICZM untuk masyarakat pada tanggal 21-23 Oktober 2021 yang dihadiri oleh 35 peserta (26 laki-laki dan 9 perempuan) di Wiasai, Raja Ampat.		
		Dua puluh fasilitator (staff daerah/satf pusat) mengikuti training of trainer (TOT) dan training workshop fasilitator ICZM di Bali	Terlaksananya kegiatan (TOT) dan training workshop fasilitator ICZM di Bali. Peserta kegiatan ini merupakan champion terpilih middle manager dari Dinas perikanan dan kelautan Provinsi : Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali dan Bappeda Kabupaten Raja Ampat.		
		Dua workshop tentang pengelolaan perikanan sebagai bagian dari pengelolaan zona pesisir terpadu terlaksana	Terlaksananya kegiatan workshop pengelolaan perikanan dengan pendekatan bioekonomi yang dilaksanakan secara hybrid. Workshop ini dihadiri oleh berbagai stakeholders terkait secara online dan offline yang terdiri dari : (i) Pemerintah Daerah Papua Barat; (ii) Direktorat Jendal KSDA Kementerian BPN/Bappenas; (iii) IPB University		

			yaitu Rektor IPB dan kepala PKSPL LPPM IPB dan para peneliti; (iv) UNIPA; (v) Direktur Excutive ICCF dan stafnya; (vi) Project ICM PKSPL beserta Tim; (vii) University of Rhode Island; (viii) University Utara Malaysia; (ix) Perwakilan OPD Provinsi Papua Barat; (x) Perwakilan OPD Kabupaten Raja Ampat; dan (xi) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP. Adapun jumlah peserta pada workshop ini sebanyak 53 orang yang terdiri dari 29 peserta laki-laki dan 24 orang peserta perempuan.		
		Dua puluh orang staff nasional dan subnasional mengikuti Pelatihan/kursus singkat tentang bioekonomi analysis untuk meningkatkan praktek pengelolaan perikanan.	Terlaksananya kegiatan pelatihan bioekonomi untuk praktek pengelolaan perikanan yang dilakukan sebanyak 3 sesi. Peserta pelatihan berasal dari: (i) Direktorat Kelautan dan Perikanan, Bappenas, (ii) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, (iii) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, (iv) Pusat Riset Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, (v) ICCTF, dan (vi) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Adapun jumlah peserta pada workshop ini sebanyak 37 orang.		
<b>Output 3.1</b>					
<b>Ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan/atau terumbu karang) yang direhabilitasi</b>	<b>10</b>	Satu dokumen studi mendalam penilaian kondisi ekosistem kritis dan metode rehabilitasi	Sudah adanya satu dokumen studi mendalam penilaian kondisi ekosistem kritis dan metode rehabilitasi.	<b>100</b>	<b>10</b>

		Tiga kelompok konservasi dan rehabilitasi ekosistem kritis di masyarakat terbentuk	Adanya surat keputusan kelompok masyarakat pelaksana konservasi dan rehabilitasi ekosistem kritis dan terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan yang menghasilkan peraturan kampung Bersama antara Kampung Yensawai Timur.		
		Seribu enam ratus bibit dalam seratus meter persegi (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem terumbu karang terehabilitasi	Terlaksananya dan dilaporkan kegiatan rehabilitasi lamun, mangrove dan terumbu karang di Yensawai Barat. Pada kegiatan rehabilitasi tersebut dilakukan penanaman 7.530 propagul mangrove, 1521 rumpun bibit lamun dan 1.650 fragmen karang. Penanaman tersebut melebihi target awal rehabilitasi yakni penanaman 1.600 fragmen terumbu karang terehabilitasi, 5.000 propagul mangrove terehabilitasi dan 500 bibit lamun terehabilitasi.		
		Lima ribu bibit dalam satu hektar (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem mangrove terehabilitasi	Terlaksananya dan dilaporkan kegiatan rehabilitasi lamun, mangrove dan terumbu karang di Yensawai Barat. Pada kegiatan rehabilitasi tersebut dilakukan penanaman 7.530 propagul mangrove, 1521 rumpun bibit lamun dan 1.650 fragmen karang. Penanaman tersebut melebihi target awal rehabilitasi yakni penanaman 1.600 fragmen terumbu karang terehabilitasi, 5.000 propagul mangrove terehabilitasi dan 500 bibit lamun terehabilitasi. Luasan rehabilitasi ekosistem pesisir yang berhasil dicapai adalah 100 m <sup>2</sup> (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem		

			terumbu karang terehabilitasi. 1.000 m <sup>2</sup> (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem mangrove terehabilitasi dan 500 m <sup>2</sup> (ekuivalen) wilayah ekosistem lamun terehabilitasi.		
		Lima ratus rumpun bibit dalam lima ratus meter persegi (ekuivalen) wilayah ekosistem lamun terehabilitasi	Terlaksananya dan dilaporkan kegiatan rehabilitasi lamun, mangrove dan terumbu karang di Yensawai Barat. Pada kegiatan rehabilitasi tersebut dilakukan penanaman 7.530 propagul mangrove, 1521 rumpun bibit lamun dan 1.650 fragmen karang. Penanaman tersebut melebihi target awal rehabilitasi yakni penanaman 1.600 fragmen terumbu karang terehabilitasi, 5.000 propagul mangrove terehabilitasi dan 500 bibit lamun terehabilitasi. Luasan rehabilitasi ekosistem pesisir yang berhasil dicapai adalah 100 m <sup>2</sup> (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem terumbu karang terehabilitasi. 1.000 m <sup>2</sup> (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem mangrove terehabilitasi dan 500 m <sup>2</sup> (ekuivalen) wilayah ekosistem lamun terehabilitasi.		
		Satu dokumen laporan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan kawasan rehabilitasi	Adanya dokumentasi dan laporan hasil pengawasan dan pemeliharaan kawasan rehabilitasi.		

		Satu buku lesson learned program rehabilitasi ekosistem kritis tersusun	Tersedianya satu buku lesson learned program rehabilitasi ekosistem kritis tersusun		
<b>Output 3.2</b>					
<b>Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui program penyadartahuan serta kegiatan publikasi dan komunikasi proyek yang dilaksanakan</b>	<b>10</b>	Seribu enam ratus masyarakat terpapar informasi dari kegiatan kampanye publik tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya pesisir dan lautan	11.590 masyarakat di Provinsi Papua Barat terpapar informasi dari kegiatan kampanye publik tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya pesisirdan lautan . Masyarakat terpapar dari IPB TV, Indosiar, Green Indonesia, Tribun News, Detik.com, Teropong News, Radar Sorong, Diskominfo Raja Ampat, AIWA TV, Kodim Raja Ampat, mns.com dan media masa lain.	<b>100</b>	<b>10</b>
		Dua ratus empat puluh orang terlibat dalam aksi bersih pantai	<p>Sebanyak 200 orang mengikuti kegiatan aksi bersih pantai selama 4 (empat) hari pada tanggal 19-23 Maret 2022 yang bertempat di Pulau Mansinam dengan beberapa rangkaian kegiatan lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari para pemangku kepentingan yang berasal dari pemerintah pusat dan organisasi pemerintah daerah (OPD) Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari serta NGO/LSM.</p> <p>Sebanyak 240 orang mengikuti kegiatan aksi bersih pantai selama 7(tujuh) hari pada tanggal 6-13 Februari 2022 yang bertempat di Raja Ampat dengan beberapa rangkaian kegiatan lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari para pemangku kepentingan yang berasal dari pemerintah pusat dan organisasi pemerintah daerah (OPD) Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari serta NGO/LSM.</p>		

		Adanya dua kali media trip yang dilaksanakan dengan publikasi di media	Terlaksananya kegiatan media trip pada tanggal 6-13 Februari 2022 yang dilakukan dengan mengajak media lokal dan nasional untuk melihat langsung apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh program Bappenas – ICCTF bersama PKSPL IPB dengan Pemda Papua Barat dan Pemda Kabupaten Raja Ampat. Kunjungan media dibuat dengan cara yang natural, apa adanya dan semua tim berbaur. Awak media diberi kesempatan untuk bertanya sebebaskan kepada narasumber dari PKSPL IPB tentang program. Peserta kegiatan media trip ini dari Bappenas, Pemda Kabupaten Raja Ampat, ICCTF, PKSPL, TV Nasional, koran/majalah Tempo (nasional), koran Kompas (nasional), koran Republika (nasional), Detil.com (media umum), Green Indonesia (media lingkungan), IPB Today (nasional), Papua Pos (koran Provinsi), tokoh masyarakat, mitra lain di Raja Ampat dan masyarakat.		
		Tersedianya material komunikasi dan publikasi proyek	Tersedianya multimedia dan material cetak terkait proyek yang mendukung pelaksanaan proyek.		
<b>Output 4.1</b>					
<b>Dukungan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas proyek</b>	<b>5</b>	Tersusun dan tersedianya laporan berkala proyek selama 12 bulan	Sudah tersedianya laporan berkala proyek dan laporan dari setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh Paket 4	<b>100</b>	<b>5</b>
		Terlaksananya workshop mid evaluasi dan annual	Sudah terlaksananya rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021		

		Tersedianya dukungan untuk proses audit	Sudah terlaksananya Konsiyenring Monev dengan ICCTF sebagai kegiatan pendukung proses audit yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 November 2021		
		Dokumen pembelajaran proyek/praktek terbaik	Sudah tersedianya dokumen pembelajaran proyek/praktek terbaik		
		Tersedianya tim lapangan	Sudah tersedianya tim lapangan yang membantu pelaksanaan proyek berjalan dengan baik		
<b>Output 5.1</b>					
<b>Dukungan kegiatan proyek Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat</b>	<b>5</b>	Konsultan yang membantu implementasi proyek ICM-Coremap CTI tersedia	Sudah tersedianya konsultan - konsultan yang dibutuhkan dalam pemenuhan output dalam kegiatan proyek ICM-Coremap CTI di tahun 2021	<b>100</b>	<b>5</b>
		Publikasi dan hasil-hasil kegiatan yang terdiseminasi dengan baik	Sudah terpublikasinya setiap hasil kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020-2022 melalui media sosial instagram (PKSPL) dan website (PKSPL dan IPB news)		
		Lancarnya dukungan operasional untuk implementasi proyek	Tersedianya dukungan operasional dengan baik setiap bulannya dalam pemenuhan output proyek dan implementasi kegiatan yang direncanakan.		

### 2.3. Hambatan dalam Pencapaian output dan Upaya Mengatasi

#### a. Hambatan

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian output adalah adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tertundanya beberapa kali agenda survei di Manokwari maupun Raja Ampat. Pandemi ini menyebabkan adanya peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat ataupun pembuat kebijakan lainnya.

Hambatan lain yang dihadapi adalah sulitnya mendapatkan akses untuk memperoleh data terkait RZWP-3-K. Kondisi kantor-kantor dinas yang masih menjalankan *work from home* (WFH) juga menjadi salah satu kendala dalam proses pengiriman surat. Beberapa kali surat yang dititipkan tidak sampai kepada yang ditujukan dalam surat. Sehingga dalam beberapa kegiatan pelatihan, terdapat peserta yang sedikit lebih lama dalam melakukan konfirmasi kehadiran. Adapun karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19, banyak kegiatan seperti pelatihan workshop, dan rapat yang dilakukan secara daring. Kelemahan dari sistem daring ini adalah penyampaian materi yang diterima peserta menjadi sedikit berkurang, persepsi antar anggota tim saat rapat bisa menjadi berbeda, dan alat peraga yang digunakan saat pelatihan tidak dapat digunakan oleh peserta.

#### b. Upaya Mengatasi

Beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

1. Melakukan penjadwalan ulang di bulan selanjutnya untuk menggantikan agenda yang belum terlaksana
2. Memanfaatkan aplikasi video conference zoom dan google form sebagai sarana untuk melakukan rapat koordinasi dengan pihak daerah
3. Mengubah metode dalam melakukan survei serta memadatkan aktivitas ketika survei dilakukan (survei dilakukan dengan tetap menaati protokol penanganan covid-19 sesuai dengan anjuran pemerintah.
4. Melakukan follow up terhadap penerima surat undangan di setiap dinas terkait dan memastikan surat undangan sudah diterima dengan baik.
5. Menyiapkan hal-hal teknis dan melakukan gladi bersih sebelum acara dimulai (pelatihan, workshop, dll), guna memastikan tidak ada gangguan pada saat pelaksanaan kegiatan.
6. Melakukan follow up terhadap penerima surat permohonan akses di dinas terkait dan memastikan surat permohonan sudah diterima dengan baik.

## 2.4 Penyerapan Anggaran

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan persentase penyerapan anggaran keseluruhan

Tabel 3 Penyerapan anggaran keseluruhan

<b>Output</b>	<b>Budget AWP</b>	<b>Budget Disbursed</b>	<b>% Disb</b>
<b>Output 1.1</b>			
Platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) yang berisi aturan dan prosedur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.			
<b>Output 1.4</b>			
Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K yang dibangun dan diimplementasikan			
<b>Output 2.1</b>			
Pemangku kepentingan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi.			
<b>Output 3.1</b>			
Ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan/atau terumbu karang) yang direhabilitasi			
<b>Output 3.2</b>			
Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui program penyadartahuan serta kegiatan publikasi dan komunikasi proyek yang dilaksanakan			
<b>Output 4.1</b>			
Dukungan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas proyek			
<b>Output 5.1</b>			
Dukungan kegiatan proyek Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat			

### 3 DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN PROYEK

#### 3.1 Dampak proyek terhadap masyarakat/pemerintah/lingkungan

PKSPL IPB mengidentifikasi beberapa dampak yang dapat dirasakan langsung masyarakat dan juga dampak ikutan.

##### a. Dampak Secara Langsung bagi Masyarakat/Pemerintah/Lingkungan

Dampak langsung dari kegiatan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi.
- Pemerintah Daerah mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan pesisir.
- Masyarakat yang teridentifikasi melalui kajian dan survei yang dilakukan akan memperoleh peningkatan kapasitas sehingga kapasitasnya dalam pengelolaan ekosistem laut.
- Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan penyusunan konsep dan strategi pembangunan yang diperoleh dari sumber pendanaan non APBD.
- Pemerintah setempat juga secara bersama sama dapat saling memperkuat strategi pelaksanaan program di Raja Ampat.

##### b. Dampak ikutan

- Dengan pelaksanaan program kapasitas terdapat dampak peningkatan pengetahuan yang terus bergulir dari satu orang ke yang lainnya.
- Dengan kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat ikut bermanfaat bagi kelestarian lingkungan.
- Pada pemerintah dampak ikutan dapat berupa adanya program-program yang dapat diintegrasikan dalam kerangka pembangunan daerah.
- Dengan adanya interaksi antar berbagai elemen, pihak baik didalam ataupun di luar Papua, akan meningkatkan kerjasama yang semakin kuat.

#### 3.2. Strategi dan Keberlanjutan Proyek

Tahun 2021 ini merupakan tahun kedua proyek COREMAP CTI Paket 4 diimplementasikan, yang akan berlangsung hingga Februari 2022. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini merupakan kegiatan untuk mencapai capaian output dari proyek ini. Namun demikian target-target yang dicapai pada tahun 2021 ini dapat menjadi faktor penentu dan strategi dalam hal keberlanjutan proyek. Strategi dan Keberlanjutan Proyek Paket 4 diantaranya adalah:

1. Program yang telah dirintis dalam proyek dapat dilanjutkan oleh pemerintah dan masyarakat.
2. Rencana kerja pembangunan pemerintah harus mengakomodir rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari kajian-kajian yang telah dilakukan.
3. Pemerintah dan masyarakat setempat wajib mencegah/mempertahankan investasi/program yang telah dibangun/dilaksanakan di setiap lokasi.

#### 4 INOVASI DAN TEROBOSAN

Berikut merupakan inovasi dan terobosan yang diberikan dari kegiatan/proyek yang dilaksanakan oleh Paket 4.

Inovasi Platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) yang berisi aturan dan prosedur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan solusi dari permasalahan pemerintah daerah yang masih mengelola kawasan konservasi secara parsial. Pengelolaan kawasan konservasi secara parsial tidak dapat menyelesaikan problem wilayah pesisir yang memiliki karakter multi use, multi stakholder dan multi disiplin. Pembuatan Platform merupakan terobosan agar Pemda memiliki landasan dan juga panduan dalam menjalankan skema keterpaduan tersebut sehingga akan lebih mudah dalam mengimplementasikan RZWP3K secara lebih efisien karena dikelola dalam satu payung.

Inovasi Sistem monitoring dan evaluasi (monev) implementasi RZWP-3-K yang dibangun dan diimplementasikan merupakan solusi dari permasalahan pengelolaan sumberdaya yang rentan dan mudah mengalami degradasi di kawasan konservasi. Dengan adanya sistem monev, dapat memberikan inovasi dan solusi agar implementasi RZWP3K dapat terealisasi. Sehingga pemerintah daerah akan lebih mudah memonitor pelaksanaan permasalahan yang dihadapi dan juga menghindari konflik antar pengguna. Sistem monev akan dibangun dengan prinsip melibatkan semua pihak dan mudah dioperasikan, sehingga semua pihak dapat terlibat didalamnya.

Inovasi pembuatan

#### 5 PEMBELAJARAN

##### **Efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut**

Indikator saran/outcome dari efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut adalah peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut yang meliputi:

- 1.1. Tersusunnya satu platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) yang berisi aturan dan prosedur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Papua Barat (output 1.1).
- 1.2. Tersusunnya satu rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K (output 1.2).
- 1.3. Tersusunnya satu rencana teknis pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung (output 1.3).
- 1.4. Terbangun dan terimplementasikannya satu sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K, serta satu manual guidance (output 1.4).

Pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sasaran/outcome ini memiliki pembelajaran tersendiri yang kemudian dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Pembelajaran ini didapatkan dari proses persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan suatu kegiatan. Pembelajaran dari sasaran peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut adalah sebagai berikut:

- Provinsi Papua Barat telah memiliki dasar dan landasan yang berbasis *scientific* untuk menjalankan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecilnya secara berkelanjutan yang didasari pengelolaan terpadu, Hal ini sangat mendukung visi Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Berkelanjutan (Provinsi Konservasi).
- Platform merupakan suatu inovasi dan pembelajaran karena belum ada platform ICM yang diterapkan di Indonesia.

- Peran stakeholder dan semua komponen masyarakat khususnya masyarakat pesisir masih harus ditingkatkan dalam hal partisipasi, memberikan input, dan melakukan kontrol terhadap pembangunan di wilayah pesisir.
- Meskipun platform ini bukan merupakan dokumen wajib, tetapi sangat penting untuk mengarahkan pelaksanaan pengelolaan pesisir terpadu termasuk mendukung implementasi RZWP-3-K.
- Dokumen rencana teknis protokol implementasi RZWP-3-K berisi instrumen pengelolaan berupa perencanaan pembangunan daerah, perencanaan tata ruang pesisir, mekanisme pemantauan dan evaluasi tata ruang pesisir.
- Pengelolaan informasi diperlukan dalam penyusunan dokumen teknis protokol implementasi RZWP-3-K sehingga dokumen yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Metode yang digunakan dalam penyusunan dokumen protokol ini adalah dengan studi literatur, dan analisis peran dan fungsi pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya hal tersebut, diperlukan pendampingan berkelanjutan.
- BKKPN UPT Kupang Satker Raja Ampat menyambut baik adanya kegiatan pembuatan dokumen rencana teknis ini karena membantu kinerja dan pelengkapan dokumen milik BKKPN UPT Kupang Satker Raja Ampat. Hal ini karena dokumen daya dukung milik BKKPN baru sampai Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) dan belum detail. Dokumen rencana teknis merupakan turunan dari dokumen RPZ.
- Kegiatan pengambilan data survei dilapang harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pihak terkait tersebut seperti dinas pemerintahan, kepala desa, kepala adat dan tokoh masyarakat lainnya. Hal ini bertujuan sebagai kegiatan minta izin (ketuk pintu) agar kegiatan diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak curiga dan keamanan dan kenyamanan tim survei bisa terjaga.
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi RZWP-3-K Provinsi Papua Barat yang dibangun dan diimplementasikan memungkinkan setiap orang dan lembaga untuk dapat berpartisipasi dalam proses monitoring dan evaluasi RZWP-3-K.
- Sistem Monitoring dan Evaluasi Implementasi RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat akan berjalan dengan efektif apabila Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat memiliki super admin dan admin yang kompatibel untuk mendukung sistem berjalan dengan efektif.
- Sistem Monitoring dan Evaluasi Implementasi RZWP-3-K di Provinsi Papua dapat diunduh pada play store dengan nama aplikasi simona yang dapat diakses dengan download simona pada google play untuk pengguna android.

#### **Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir terpadu**

Indikator saran/outcome dari peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir terpadu adalah pengembangan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi yang meliputi:

- 2.1. Terlaksananya lima kegiatan peningkatan kapasitas di lokasi target
- 2.2. Tersedianya data dasar tentang kapasitas para pemangku kepentingan untuk setiap materi yang dilatihkan
- 2.3. Seratus tujuh belas orang, yang terdiri dari 82 pemangku kepentingan dan 35 masyarakat yang menerima akan pengetahuan dan ketrampilan
- 2.4. Dua puluh lima persen pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan ketrampilan baru akibat dari intervensi program

Keempat sasaran tersebut masuk dalam satu outcome yakni output 2.1. Pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sasaran/outcome ini memiliki pembelajaran tersendiri yang kemudian dapat dijadikan

acuan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Pembelajaran ini didapatkan dari proses persiapan ,pelaksanaan, hingga pelaporan suatu kegiatan. Pembelajaran dari sasaran pengembangan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi adalah sebagai berikut:

- Pelatihan, training ataupun workshop yang dilakukan mampu membuat para peserta menjalin komunikasi bahkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan cara membuat whatsapp group yang dapat digunakan sebagai wadah bertukar informasi dan silaturahmi antar alumni pelatihan.
- Capaian peningkatan kapasitas peserta pelatihan dari semua pelatihan ataupun training yang dilakukan menunjukkan hasil diatas target awal. Hal ini menunjukkan bahwa peserta dapat menyerap materi dengan baik dan dapat mmebantu peserta yang merupakan pemangku kepentingan untuk dapat membantu percepatan implementasi RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat.
- Meskipun seluruh kegiatan pengembangan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi dapa dikatakan berhasil, terdapat hal-hal yang perlu menjadi catatan untuk kegiatan pelatihan kedepan. Catatan tersebut terkait dengan perlu adanya koordinasi yang matang antara peserta dan panitia saat pelaksanaan *field trip* supaya kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan optimal. Dalam salah satu kegiatan pelatihan yang dilakukan yakni training of trainer (TOT) dan training workshop fasilitator ICZM di Bali, kegiatan *field trip* tidak berjalan dengan optimal karena keterbatasan waktu dan keinginan peserta untuk menikmati keindahan alam Nusa Penida. Selain hal tersebut, pembelajaran dalam pelaksanaan pelatihan yang dapat digunakan untuk kegiatan selanjutnya adalah perlu adanya pemetaan kemampuan dan latar belakang peserta pelatihan, sehingga pelatih ataupun pemateri dapat mengetahui batas minimal dan maksimal dalam penyampaian materi ataupun praktek. Penyesuaian latar belakang Pendidikan, pekerjaan ataupun lingkungan tempat tinggal juga harus dilakukan supaya peserta yang mengikuti pelatihan merupakann peserta yang berpotensi untuk menyerap ilmu sebaik-baiknya dan membantu menyebarkan ilmu dan pemahaman yang telah didapatkan setelah mengikuti pelatihan.

#### 4.3. Pemulihan ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Indikator saran/outcome dari pemulihan ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah pulihnya ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi:

- 3.1. Tersedianya data dasar atau hasil kajian cepat tentang ekosistem kritis yang ada di lokasi target (output 3.1).
- 3.2. Seratus lima puluh meter persegi (ekuivalen) terumbu karang, satu hektar (ekuivalen) mangrove, lima ratus meter persegi (ekuivalen) lamun sebagai ekosistem kritis yang direhabilitasi yang juga sebagai demoplot/penelitian untuk metode rehabilitasi (rehabilitasi berbasis pengetahuan) (output 3.1).
- 3.3. Enam puluh pemangku kepentingan yang mendapatkan pengalaman dalam rehabilitasi ekosistem pesisir (output 3.1).
- 3.4. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pemeliharaan ekosistem yang direhabilitasi minimal tiga kali dalam setahun (output 3.1).
- 3.5. Dua ribu lima ratus masyarakat yang akan terpapar langsung informasi melalui kegiatan penyadartahuan dan aksi pelestarian ekosistem (output 3.1).

- 3.6. Adanya diseminasi kegiatan rehabilitasi melalui kegiatan media visit atau kegiatan diseminasi lainnya melalui media massa cetak atau online (output 3.2).
- 3.7. Tersedianya material komunikasi dan publikasi proyek (output 3.2).

Pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sasaran/outcome ini memiliki pembelajaran tersendiri yang kemudian dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Pembelajaran ini didapatkan dari proses persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan suatu kegiatan. Pembelajaran dari sasaran pulihnya ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut:

- Adanya inovasi dan inisiatif warga Kampung Yensawai Barat yang berhasil membuat metode korbon pancang sebagai salah satu teknik rehabilitasi mangrove yang dapat diterapkan di Kampung Yensawai Barat, Raja Ampat.
- Adanya inovasi ecopolybag dari daun pandan yang dapat digunakan sebagai wadah bibit untuk rehabilitasi.
- Target rehabilitasi pada masing-masing ekosistem kritis di Yensawai Barat dapat terpenuhi dan bahkan melebihi target awal.
- Adanya peraturan kampung yang mengatur tentang pengelolaan pesisir dan laut Kampung Yensawai Timur dan Yensawai Barat.
- Pelaksanaan rehabilitasi harus memperhitungkan waktunya. Hal ini berkaitan dengan kondisi, iklim dan cuaca alam.
- Keberhasilan rehabilitasi ekosistem kritis di Kampung Yensawai Barat menarik donor lain untuk dapat melanjutkan kegiatan rehabilitasi di wilayah tersebut. Contoh donor yang sudah melakukan kerjasama lanjutan adalah CSR dari PLN Persero.
- Perlu adanya rancangan khusus dalam penyebaran informasi pelaksanaan kegiatan di media sosial. Hal ini untuk menghindari adanya kondisi yang tidak diinginkan seperti media sosial terkena *hack* dan terblokir.
- Pemetaan calon penerima informasi proyek dan bentuk transfer informasi harus dimatangkan. Kondisi tersebut berkaitan dengan perbedaan daya tangkap informasi dari masing-masing latar belakang.
- Penyebaran informasi program sudah diliput oleh media lokal seperti Radar Sorong, media nasional seperti Indosiar hingga media internasional seperti NatGeo. Penyebaran informasi ini membuat masyarakat luas dapat mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan oleh PKSPL IPB.
- Perlu adanya koordinasi terkait pengumpulan dokumentasi, infografis maupun video pendukung dalam penyebaran informasi program. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan dokumen tercecer dan tidak dimanfaatkan secara optimal.
- List berita dan publikasi yang telah diterbitkan sebaiknya dimasukkan dalam bank data yang kemudian dapat menjadi acuan jika suatu saat list berita tersebut dibutuhkan.

## **6 REKOMENDASI PENTING SEBAGAI TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL/OUTPUT SETELAH PROGRAM BERAKHIR DAN TANTANGANNYA**

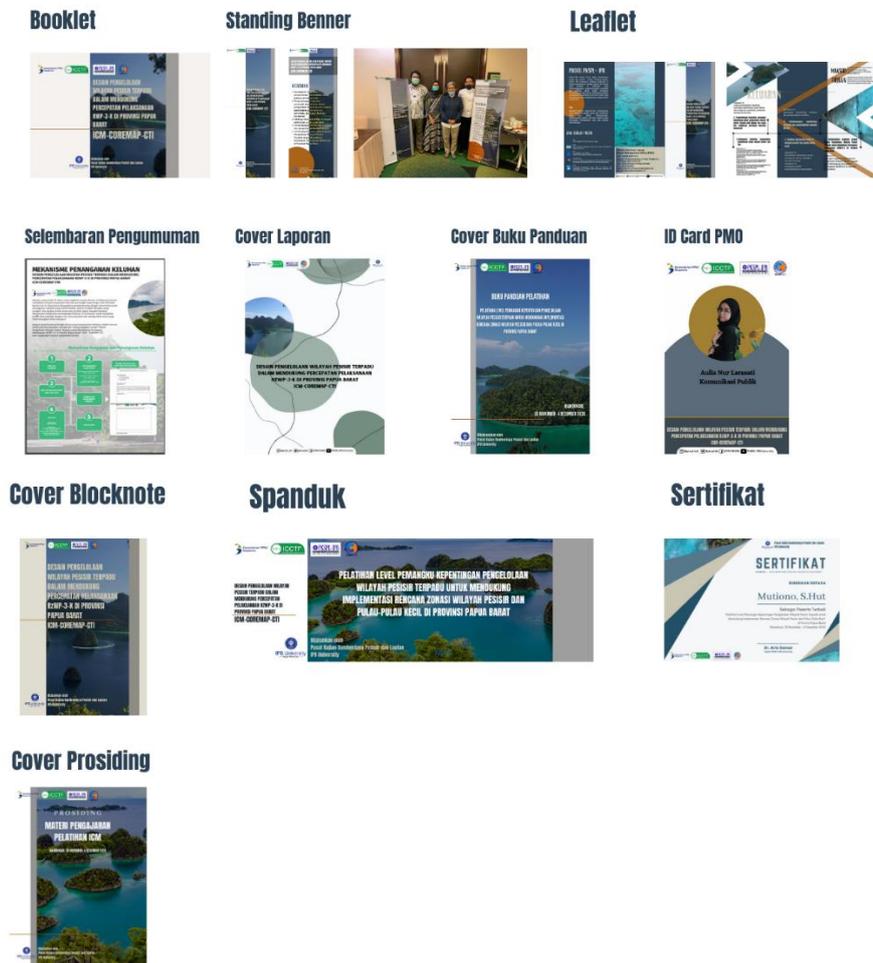
1. Perbaiki sistem manajemen penugasan personil di Pemda. Dalam hal ini yang ditugaskan untuk terlibat dan mengawal program (personal incharge) harus secara konsisten mengawal program ini secara konsisten sehingga hasil program dapat terus dinikmati oleh pemerintah dan masyarakat;
2. Harus melibatkan mitra perguruan tinggi lokal sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan mendampingi Pemda dalam menindaklanjuti hasil kegiatan;

3. Pada tingkat tapak (masyarakat) desa, harus disiapkan local champion yang akan terus mengawal dan melanjutkan program meskipun dilakukan secara voluntary;
4. Menyiapkan strategi yang tepat dan harus dibuat pernyataan komitmen pada semua level. Untuk itu perlu dilakukan workshop strategi sebelum kegiatan berakhir.

## LAMPIRAN

### 1. Publikasi/produk komunikasi yang dihasilkan

# MEDIA CETAK



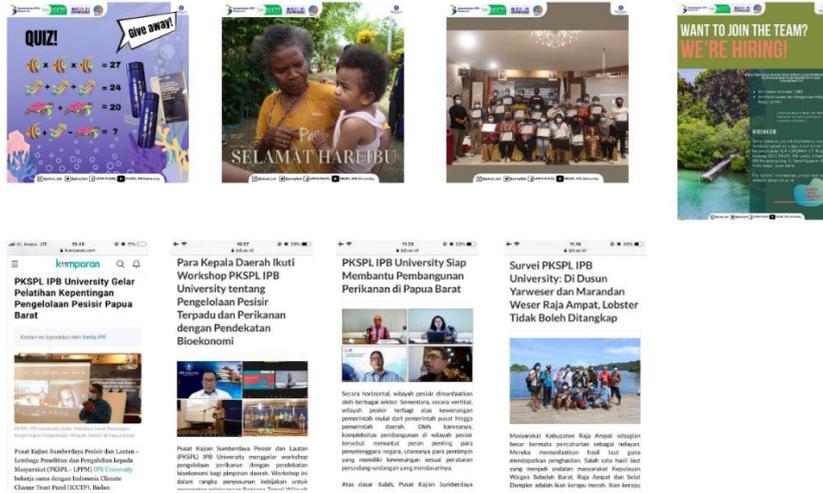
Gambar 1 Media cetak yang dihasilkan sebagai produk publikasi dan komunikasi

# MEDIA KIT

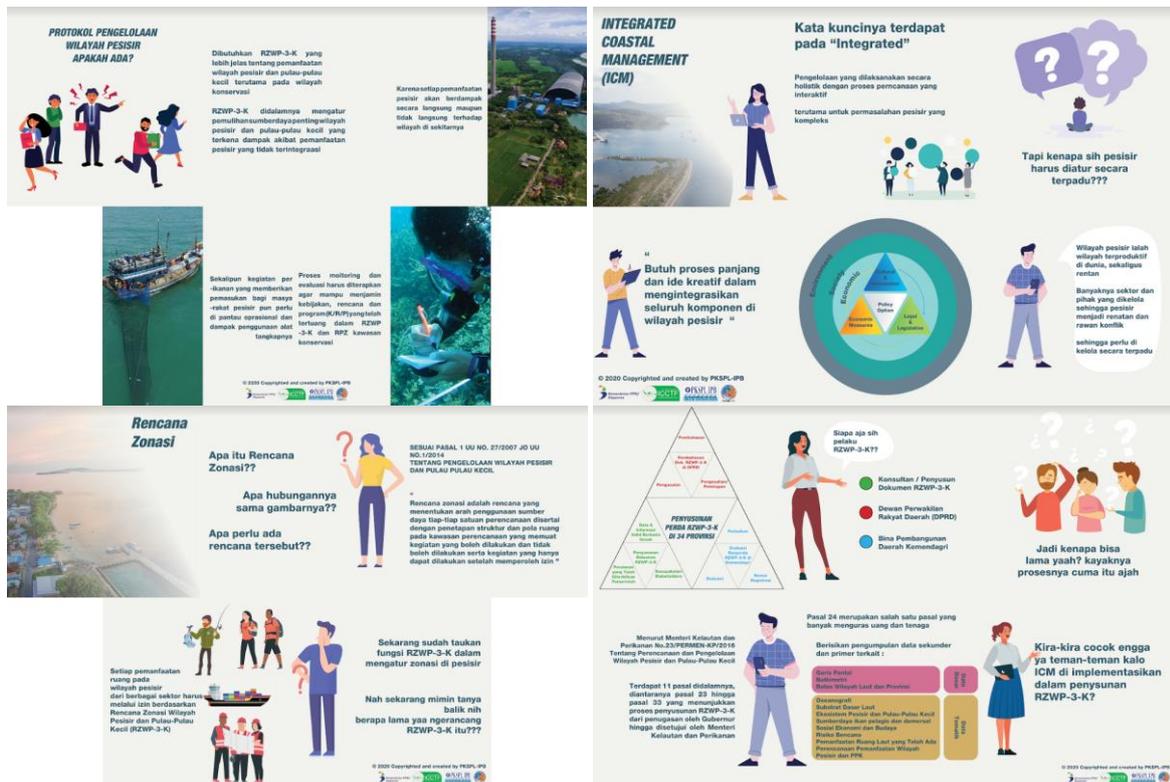


Gambar 2 Produk media kit yang dihasilkan

# MEDIA SOSIAL



Gambar 3 Berita-berita yang dimuat di media sosial dan website IPB official



Gambar 4 Desain *funfact* yang dimuat di media sosial dan website PKSP

2. Dokumen pendukung pembuktian capaian indikator untuk setiap output



Wawancara personil untuk menempati posisi program officer tanggal 27 Juli 2020 di sekretariat PMO Coremap-CTI PKSPL IPB



Wawancara personil untuk menempati posisi money and reporting specialist tanggal 27 Juli 2020 di sekretariat PMO Coremap-CTI PKSPL IPB



Wawancara tenaga ahli untuk menempati posisi komunikasi media pada tanggal 27 Agustus 2020 di sekretariat PMO Coremap-CTI PKSPL IPB



Wawancara salah satu pelamar Ahli Capacity Building pada tanggal 23 September 2020



Wawancara salah satu pelamar Fasilitator untuk Masyarakat di Raja Ampat pada tanggal 24 September 2020



Wawancara salah satu pelamar Fasilitas stakeholder di provinsi pada tanggal 25 September 2020  
**Gambar 5** Beberapa proses wawancara terhadap calon konsultan dan tenaga lapang



Sesi diskusi dan pembedahan kuisiener survei KAP di Kampus UNIPA, Waisai (16 Oktober 2020)



Sesi pelatihan pengisian kuisiener survei KAP di Kampus UNIPA, Waisai (16 Oktober 2020)



Pembukaan Coaching KAP di Manokwari oleh Direktur ICM COREMAP CTI (20 Oktober 2020)



Pemaparan materi coaching oleh Deputi Direktur ICM COREMAP CTI (20 Oktober 2020)



Beberapa kegiatan wawancara oleh enumerator dengan beberapa responden di Kab. Raja Ampat (17 – 23 Oktober 2020)



Beberapa kegiatan wawancara oleh enumerator dengan beberapa responden di Prov. Manokwari (21 – 27 Oktober 2020)



Survei pengambilan dokumentasi dan peliputan sebagai bahan/materi kampanye publik di Kab.Raja Ampat (16 – 20 Oktober 2020)



Diskusi dengan LSM Bentang Nusantara Papua di Manokwari (25 Oktober 2020)



Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, UNIPA, dan BLUD (24 Oktober 2020)



Koordinasi dengan Fasilitator lokal dan site manager di Manokwari (21 Oktober 2020)



Peserta workshop penatausahaan pada tanggal 22 dan 23 Oktober 2020



Sesi diskusi pada workshop penatausahaan pada tanggal 23 September 2020

**Gambar 6 Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama bulan September – Oktober 2020**

**Kegiatan survei tim rehabilitasi ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, dan pemberdayaan masyarakat pesisir**



Pengambilan data Terumbu Karang dengan metode Photo



Wawancara dengan salah satu nelayan di Kampung Meos Manggara



Photo: Ngudi Nurhidayat/CO

Proses pengambilan data dimensi pohon di mangrove



Photo: Robba Fahrisy/COREMAP-CTI F

Penghitungan tegakan jenis lamun dalam plot

**Kegiatan Training ICZM Pemangku Kepentingan**



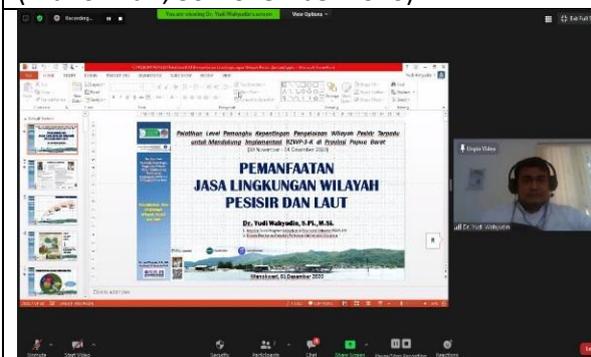
Sambutan dan penyampaian status dan kondisi terkini pengelolaan kelautan dan perikanan Provinsi Papua Barat oleh Bapak Jacobis Ayomi, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat (Manokwari, 30 November 2020)

**MARINE PROTECTED AREAS: Konsep dan Implementasi**

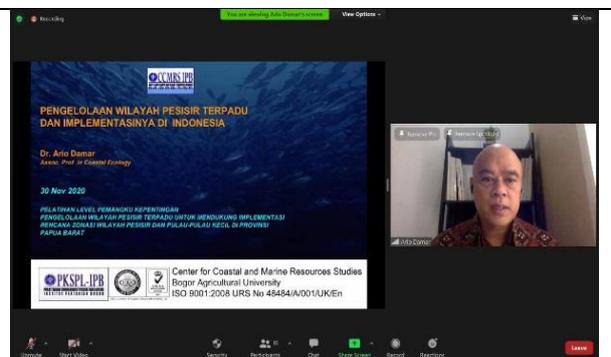
RONI BAWOLE  
 FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
 UNIVERSITAS PAPUA, MANOKWARI  
 TLP. 08124830507; EMAIL: r.bawole@unipa.ac.id; ronibawole@yahoo.com



Pemaparan materi oleh Prof Roni Bawole secara offline



Pemaparan materi Jasa Lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut dari Dr. Yudi Wahyudin secara online (1 Desember 2020)



Pemaparan materi Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dan Implementasinya di Indonesia dari Dr. ArioDamar secara online (30 November 2020)

## Workshop Pemantapan Platform Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (ICM) Provinsi Papua Barat



Pembicara pada kegiatan workshop pemantapan platform ICM Prov. Papua Barat (27 - 28 November 2020)

### Kegiatan ICM Leader Forum



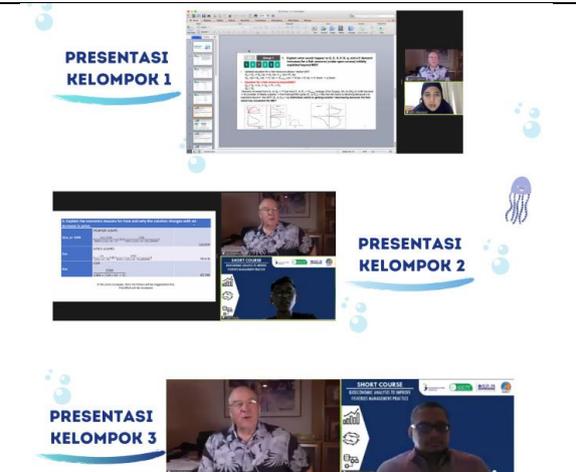
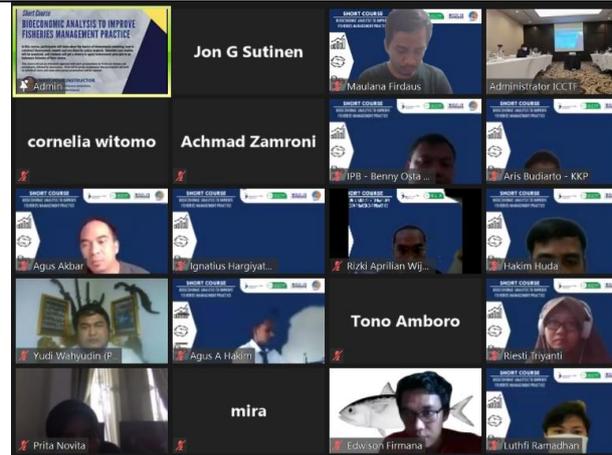
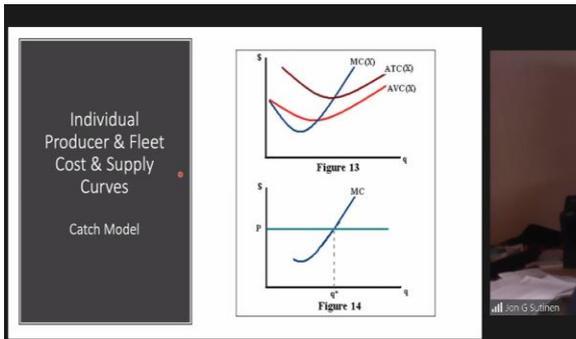
Pembicara pada kegiatan ICM Leader Forum di Manokwari (23 November 2020)

### Kick Off Meeting

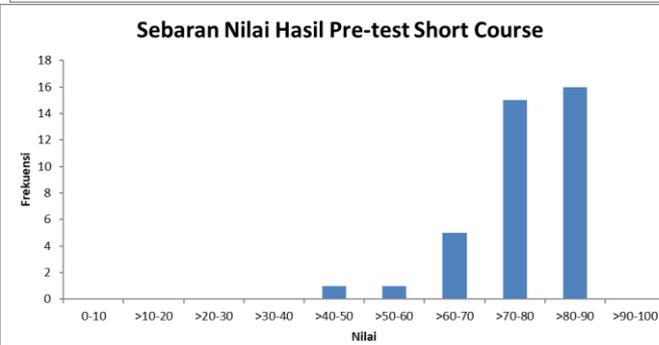
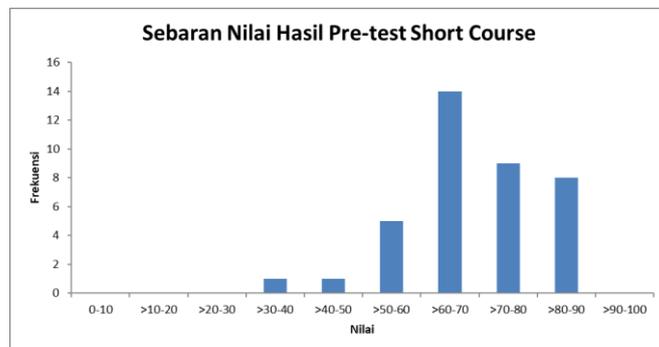


Pelaksanaan Kick off meeting di Sorong dan Raja Ampat

## Short course Bioekonomi Perikanan



Presentasi keleompok pada kegiatan Shortcourse bioekonomi pada sesi ke-2



Terdapat peningkatan hasil pre-test dan post-test peserta pelatihan pada kegiatan short course bioekonomi

Gambar 7 Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama bulan November - Desember 2020

### 3. Dokumen lainnya



### Recent Highlights

You received +356.2% more content interactions in the last 7 days compared to Oct 23 - Oct 29.

#### Overview

<b>634</b> Accounts Reached	+111.3% >
<b>219</b> Content Interactions	+356.2% >
<b>520</b> Total Followers	+2.1% >

#### Content You Shared

4 Posts >

< **Insights** ⓘ

Last 30 Days ▾



### Recent Highlights

You gained 28 more followers in the last 30 days.

#### Overview

<b>743</b> Accounts Reached	+1.6% >
<b>370</b> Content Interactions	-15.6% >
<b>540</b> Total Followers	+5.4% >

#### Content You Shared

8 Posts >

< **Insights** ⓘ

Last 30 Days ▾



### Recent Highlights

You reached +30.7% more accounts in the last 30 days compared to Oct 16 - Nov 14.

#### Overview

<b>969</b> Accounts Reached	+30.7% >
<b>297</b> Content Interactions	-24.5% >
<b>573</b> Total Followers	+9.7% >

#### Content You Shared

6 Posts >

< **Insights** ⓘ



### Recent Highlights

You received +100.7% more content interactions in the last 30 days compared to Nov 15 - Dec 14.

#### Overview

<b>1,458</b> Accounts Reached	+50.4% >
<b>558</b> Content Interactions	+100.7% >

#### Your Audience [See All](#)

<b>654</b> Total Followers	+14.1%
-------------------------------	--------

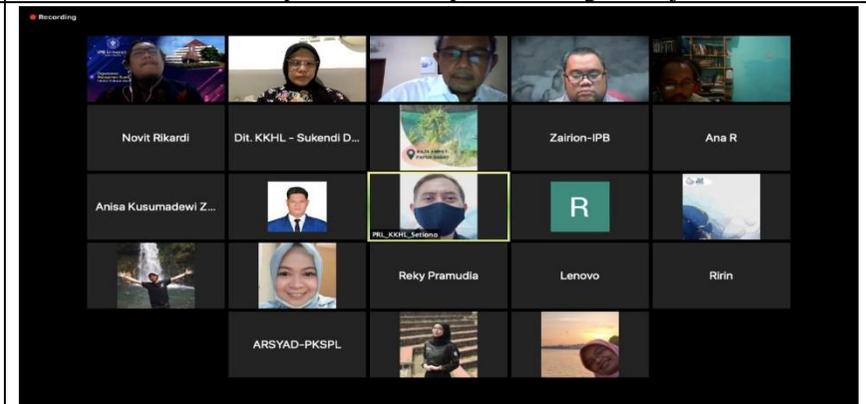
#### Content You Shared

9 Posts >



Paparan Andy Rusandi, M.Si pada rakor *output* 1.3 dengan Dirjen PRL

Proses diskusi pada rakor *output* 1.3 dengan Dirjen PRL

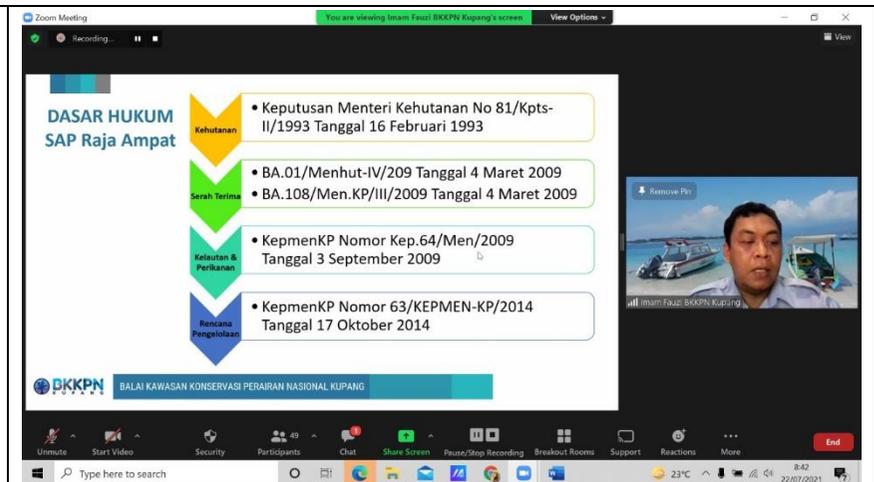


Peserta rakor *output* 1.3 dengan Dirjen PRL

Peserta rakor *output* 1.3 dengan Dirjen PRL



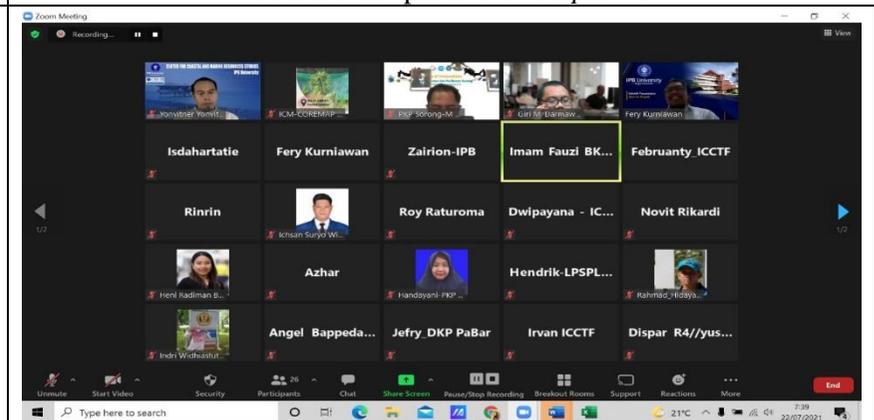
Welcome remark oleh Dr. Yonviter pada rakor rentek output 1.3



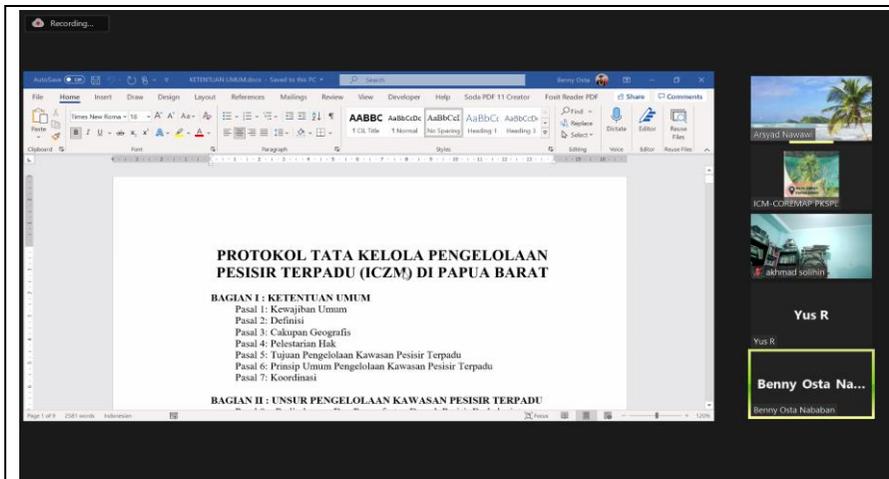
Proses diskusi pada rakor output 1.3



Keynote speech oleh Dr.Sriyanti pada rakor rentek output 1.3



Peserta pada rakor output 1.3



Rapat internal output 1.2



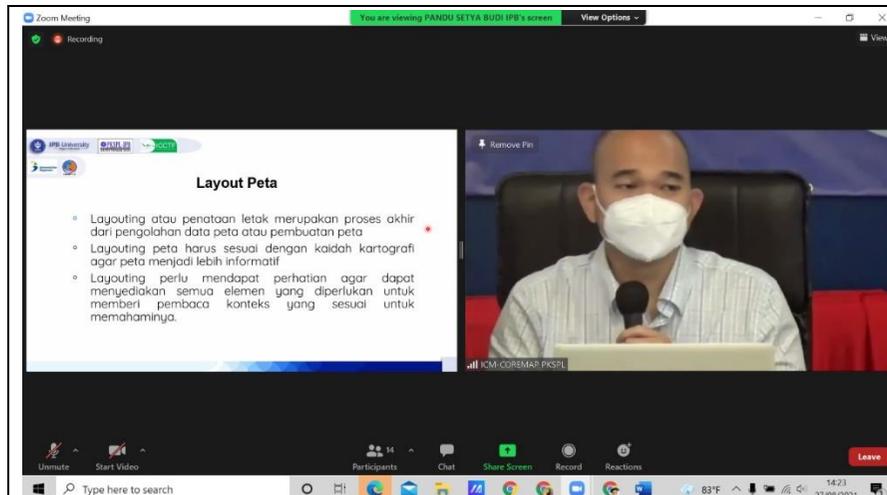
Rapat koordinasi tim output 2.1



Pembukaan kegiatan pelatihan sig dan tata ruang pesisir output 2.1



Presentasi awal kelompok di kegiatan pelatihan sig dan tata ruang pesisir output 2.1



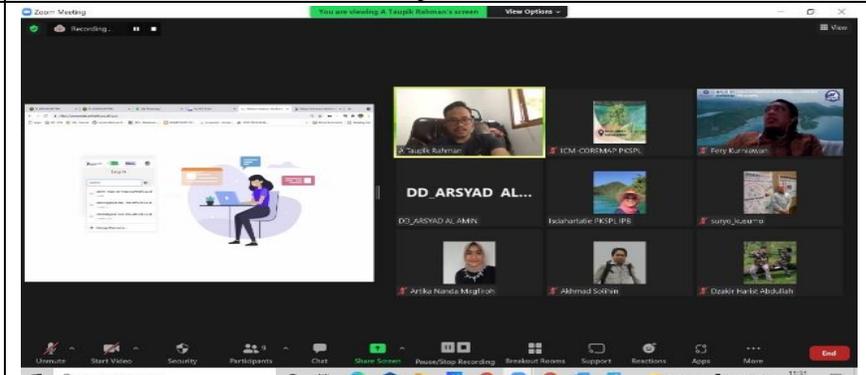
Pemaparan materi oleh pelatih di kegiatan pelatihan sig dan tata ruang pesisir output 2.1



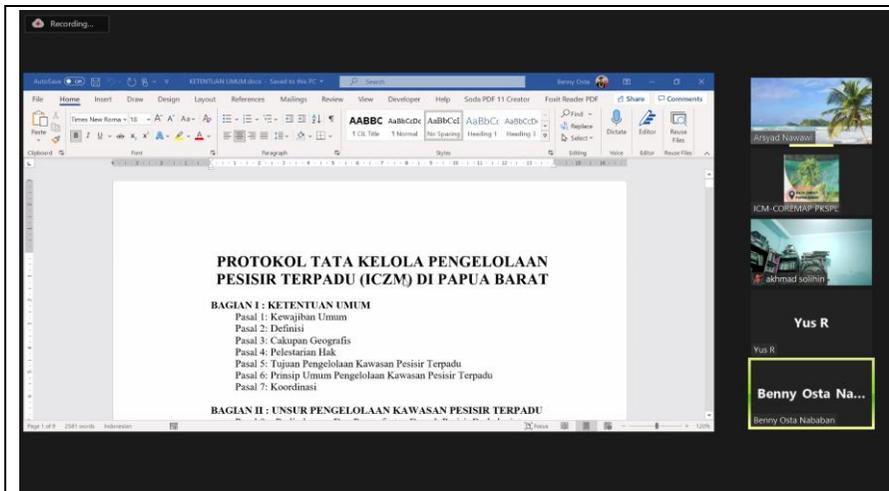
Presentasi kelompok di kegiatan pelatihan sig dan tata ruang pesisir output 2.1



Fieldtrip kegiatan pelatihan sig dan tata ruang pesisir output 2.1



Rapat internal output 1.4



Rapat internal output 1.2



Rapat koordinasi tim output 2.1



Rapat koordinasi dengan Satker BKKPN Kupang output 1.3



Rapat koordinasi dengan Satker BKKPN Kupang output 1.3



apat koordinasi dengan Perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Raja Ampat, Dinas Pariwisata Raja Ampat, Kepala BLUD Raja Ampat, serta perwakilan dari BKKPN Kupang Satker Raja Ampat untuk survey output 1.3



Snorkeling di Pulau Asbekor untuk survey output 1.3



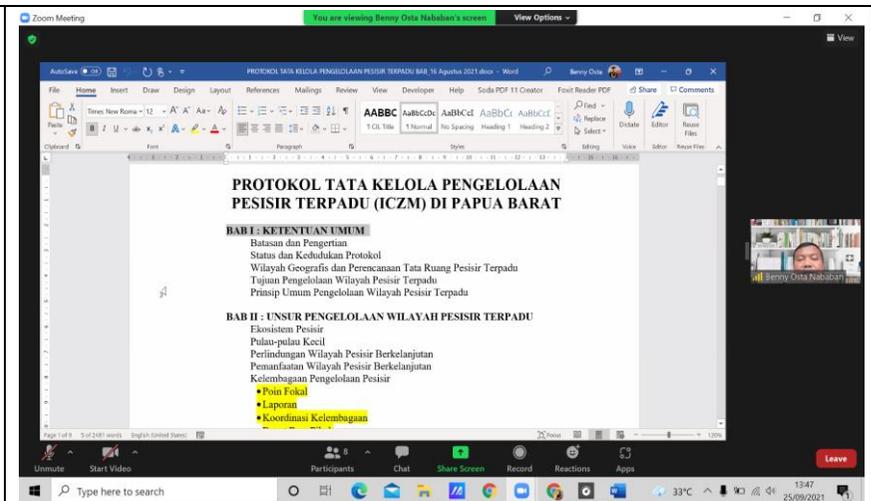
Workshop SIMONA output 1.4



Pembukaan Workshop SIMONA output 1.41



Rapat koordinasi internal output 1.2



Rapat koordinasi internal output 1.2



FGD dengan para pihak output 1.4



Peserta offline workshop pengelolaan perikanan berkelanjutan output 2.1



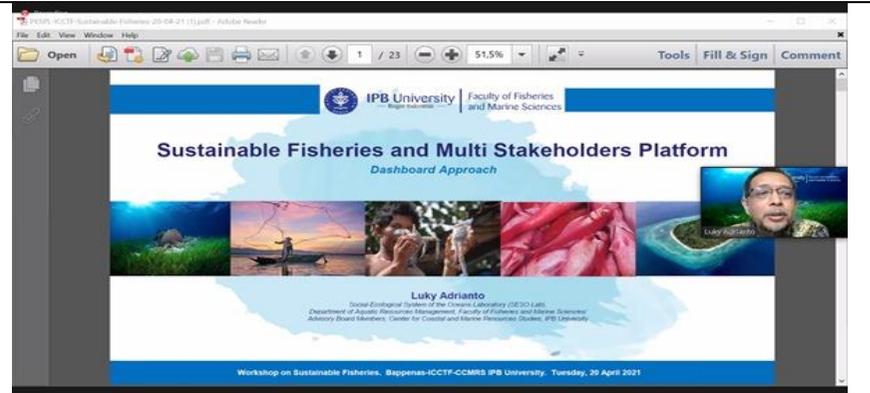
Penyiapan dan pengadaan bibit untuk rehabilitasi dan penyulaman output 3.1



Paparan materi workshop perikanan berkelanjutan oleh Prof. Sutinen



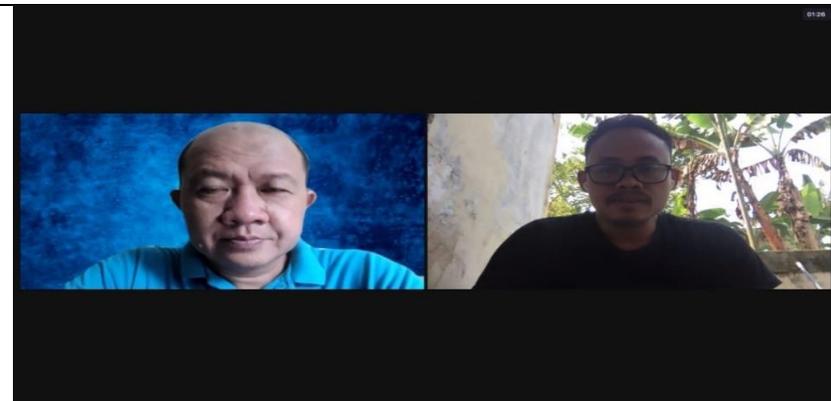
Paparan materi workshop perikanan berkelanjutan oleh Prof. Kuperan



Paparan materi workshop perikanan berkelanjutan oleh Dr. Luky



Paparan materi workshop perikanan berkelanjutan oleh Prof. Sonny



Rapat internal keberlanjutan pembuatan sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K output 1.4



Rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program output 4.1



Diskusi awal keberlanjutan program rehabilitasi ekosistem output 3.1



Diskusi money dengan Bappenas dan ICCTF output 1.4



Diskusi money dengan Bappeda Provinsi Papua Barat output 1.4



Workshop pembahasan studi mendalam penilaian kondisi, pemilihan ekosistem dan lokasi serta metode rehabilitasi output 3.1



Penguatan sosek implementasi rehabilitasi ekosistem kritis output 3.1



Rehabilitasi ekosistem lamun output 3.1



Rehabilitasi ekosistem mangrove output 3.1



Pelatihan jasa lingkungan output 3.1



Kampanye publik konsrvasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya pesisir dan lautan output 3.2